

**PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR  
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FEE AUDIT**



**SKRIPSI**

**Karya Tulis sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**

**Disusun Oleh :**

**MUTIKA DIANSEPTI**

**NIM : 1A.08.1223**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**BANK BPD JATENG**

**SEMARANG**

**2012**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR  
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FEE AUDIT**

**Disusun Oleh :**

**MUTIKA DIANSEPTI**

**NIM : 1A.08.1223**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
STIE Bank BPD Jateng**

**Semarang,**

**2012**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**NUR ANISSA, SE, MSi, Akt  
NIDN :0604037302**

**SUHANA, SS, MM  
NIDN :0601107001**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR  
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FEE AUDIT**

Disusun Oleh :

**MUTIKA DIANSEPTI**

**NIM : 1A.08.1223**

Diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi STIE Bank BPD Jateng pada tanggal.....

Semarang, 2012

**TIM PENGUJI**

1. **NUR ANISSA, SE, MSi, Akt**  
NIDN : 0604037302
2. **YOHANA KUS S., SE, MSi**  
NIDN : 0611056902
3. **ALI MURSID, SS, MM**  
NIDN : 0623076901

**TANDA TANGAN**

.....  
.....  
.....

Mengesahkan,  
Ketua STIE Bank BPD Jateng

**Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM**  
NIDN : 0607084501

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik struktur *corporate governance* (dewan komisaris dan komite audit) terhadap *fee* audit. Keberadaan dewan komisaris dan komite audit sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian diharapkan dapat mengurangi dan mengontrol risiko, sehingga *fee* audit yang rendah dapat dicapai. Penelitian ini menguji kembali dari penelitian Yatim *et al.* (2006) dan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2010. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, dan jumlah komite audit tidak berpengaruh terhadap *fee* audit. Independensi dewan komisaris dan intensitas pertemuan komite audit mempunyai pengaruh signifikan positif, sedangkan keahlian komite audit mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap *fee* audit. Hal tersebut membuktikan bahwa independensi dewan komisaris dan intensitas pertemuan komite audit akan menuntut kualitas audit yang tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi pula, serta keahlian komite audit akan mengurangi penilaian risiko yang terkait dengan proses pelaporan yang mengurangi pengujian audit dan berakibat rendahnya *fee* audit.

Kata kunci : dewan komisaris, komite audit, *fee* audit.

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of structural characteristics of corporate governance (board and audit committee) to the audit fee. The existence of the board and audit committee as a mechanism of supervision and control is expected to reduce and control risks, so the lower the audit fee can be achieved. This study examined the returns from research Yatim et al. (2006) and using secondary data derived from financial statements of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2008-2010. This study uses purposive sampling and using multiple linear regression analysis. Prior to the regression test, the data is first tested using the test classic assumptions. These results indicate that the size of the board of commissioners, the intensity of board meetings, audit committee independence and audit committee size does not affect the audit fee. The independence of board audit committee meetings and the intensity has a positive significant effect, while the expertise of audit committees have a significant impact negatively on the audit fee. It is proved that independensi board and audit committee meeting of the intensity will demand a high quality audit from external auditors, resulting in higher audit fees as well, and the audit committee expertise reduces the risk assessment associated with the reporting process and reduce audit testing results low audit fee.*

*Keywords: board of directors, audit committees, audit fee.*

STIE BPPD

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah saya,

Nama : Mutika Diansepti

NIM : 1A.08.1223

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul  
“PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE*  
TERHADAP *FEE AUDIT*”

telah saya susun dengan sebenar-benarnya dengan memperhatikan kaidah  
akademik dan menjunjung tinggi hak atas karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsure plagiarasi maupun unsur  
kecurangan lainnya pada skripsi yang telah saya buat tersebut, maka saya bersedia  
mempertanggungjawabkan dan saya siap menerima segala konsekuensi yang  
ditimpulkan termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang telah diberikan kepada  
saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa  
tanggung jawab.

Semarang, 2012

Mutika Diansepti

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*Tuhan akan menolong orang yang menolong dirinya sendiri*

*Rintangan apapun akan bisa kamu lewati jika kamu memiliki keyakinan. Kamu kuat karena kamu yakin, kamu lemah karena kamu ragu*

*Ketika kamu berharap yang terbaik tapi kamu hanya mendapat yg biasa, bersyukurlah kamu bukan yg terburuk*

### PERSEMBAHAN

*Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:*

*Mami, Papi Dede dan Intu*

*Sebagai motivator terbesar*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karuniaNya akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *FEE AUDIT*”**, guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program S-1 Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini banyak sekali bimbingan, saran dan bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak Dr. H. Djoko Sudantoko, S.Sos, MM. selaku ketua STIE Bank BPD Jateng Semarang
2. Ibu Nur Anissa, SE, MSi, Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Bank BPD Jateng dan dosen pembimbing I untuk ilmu pengetahuan yang ditularkan, perhatian, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan koreksi kepada Penulis.
3. Bapak Suhana, SS selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk koreksi dan masukan yang berharga.
4. Bapak Usman Dachlan, S.Si., MT selaku dosen wali penulis yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menjalani proses belajar di STIE Bank BPD Jateng.
5. Seluruh dosen STIE Bank BPD Jateng yang telah membagi ilmu pengetahuan baik formal maupun informal kepada Penulis.
6. Seluruh karyawan STIE Bank BPD Jateng yang telah membantu kelancaran berbagai hal di STIE Bank BPD Jateng
7. Momi tercinta, Hj. Purwaningsih yang telah memberikan doa, cinta, dan dukungan yang tidak ada habisnya



8. Popi tersayang, H. Suyanto SP., SE yang telah memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan yang tidak ada habisnya
9. Dede termanja, Kintan Destiara Putri yang menemani baik dalam suka maupun duka.
10. Intana uty, Widi Prayitno S.Kom yang terus memberikan perhatian, cinta, dan dukungan yang tidak ada habisnya.
11. Penghuni kos 700, Cippo, Ika, Anin, Mimim, M'Opi, Mbach, dan Nupi yang selalu memberikan keceriaan selama ini.
12. Sahabat terbaik, M'uma, M'Dina, dan M'epi untuk doa dan dukungan yang diberikan.
13. Segenap teman-teman Angkatan 2008 yang telah memberikan banyak pengalaman yang indah, semangat, bantuan, dan dukungan.
14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebut satu per satu.

Akhir kata dengan segala keterbukaan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5 Kerangka Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Pustaka .....	13
2.1.1 Teori Keagenan .....	13
2.1.2 <i>Fee</i> Audit.....	15
2.1.3 Risiko Audit .....	18

2.1.4	<i>Corporate Governance</i> .....	21
2.1.4.1	Pengertian <i>Corporate Governance</i> .....	21
2.1.4.2	Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i> .....	23
2.1.4.3	Manfaat <i>Corporate Governance</i> .....	24
2.1.5	Dewan Komisaris .....	24
2.1.6	Komisaris Independen.....	26
2.1.7	Komite Audit.....	28
2.2	Pengembangan Hipotesis .....	30
2.2.1	Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap <i>Fee Audit</i> ..	30
2.2.2	Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap <i>Fee Audit</i> .....	30
2.2.3	Pengaruh Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris terhadap <i>Fee Audit</i> .....	31
2.2.4	Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap <i>Fee Audit</i> .....	32
2.2.5	Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap <i>Fee Audit</i> .....	32
2.2.6	Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit terhadap <i>Fee Audit</i> .....	33
2.2.7	Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap <i>Fee Audit</i> .....	34
2.3	Model Penelitian .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		36
3.1	Definisi Konsep.....	36
3.1.1	Variabel Dependen.....	36
3.1.2	Variabel Independen .....	36
3.1.3	Variabel Kontrol .....	38
3.2	Definisi Operasional.....	40
3.2.1	Variabel Dependen.....	40
3.2.2	Variabel Independen .....	41
3.2.3	Variabel Kontrol .....	42

3.3 Populasi dan Sampel .....	44
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	45
3.5 Metode Analisis .....	45
3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda .....	45
3.5.2 Uji Asumsi Klasik .....	47
3.5.3 Uji Keباikan Model .....	49
3.5.4 Uji Hipotesis .....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	53
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....	53
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian .....	54
4.3 Analisis dan Pembahasan .....	64
4.3.1 Model Regresi .....	64
4.3.2 Uji Asumsi Klasik .....	67
4.3.3 Uji Keباikan Model .....	73
4.3.4 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) .....	74
BAB V PENUTUP .....	81
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Keterbatasan .....	82
5.3 Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN .....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	105

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Metode Pengambilan Sampel..... 53
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif <i>Fee</i> Audit ..... 54
Tabel 4.3	Statistik Deskriptif Independensi Dewan Komisaris ..... 55
Tabel 4.4	Statistik Deskriptif Ukuran Dewan Komisaris..... 55
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris ..... 56
Tabel 4.6	Statistik Deskriptif Independensi Komite Audit ..... 57
Tabel 4.7	Statistik Deskriptif Ukuran Komite Audit ..... 57
Tabel 4.8	Statistik Deskriptif Intensitas Pertemuan Komite Audit ..... 58
Tabel 4.9	Statistik Deskriptif Keahlian Komite Audit ..... 59
Tabel 4.10	Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan ..... 59
Tabel 4.11	Statistik Deskriptif Jumlah Anak Perusahaan ..... 60
Tabel 4.12	Statistik Deskriptif <i>Leverage</i> ..... 61
Tabel 4.13	Statistik Deskriptif ROA ..... 61
Tabel 4.14	Statistik Deskriptif Rasio Persediaan atas Total Aset ..... 62
Tabel 4.15	Statistik Deskriptif Rasio Piutang atas Total Aset ..... 63
Tabel 4.16	Statistik Deskriptif Kantor Akuntan Publik ..... 63
Tabel 4.17	Analisis Model Regresi ..... 64
Tabel 4.18	Uji Multikolinearitas ..... 67
Tabel 4.19	Uji Autokorelasi ..... 68

Tabel 4.20	Uji Glejser .....	69
Tabel 4.21	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test .....	72
Tabel 4.22	Koefisien Determinas .....	73
Tabel 4.23	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	73
Tabel 4.24	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) .....	74

STIE BPD Jateng

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Penelitian .....	12
Gambar 2.1 Model COSO .....	19
Gambar 2.2 Model Penelitian .....	35
Gambar 4.1 Scatterplot .....	68
Gambar 4.2 Histogram .....	70
Gambar 4.3 Normal P-P Plot .....	71

STIE BPD Jateng

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Daftar Sampel Penelitian ..... 88
Lampiran 2	Tabulasi Data Penelitian ..... 89
Lampiran 3	Output Pengolahan Data ..... 92
Lampiran 4	Kartu Bimbingan Skripsi ..... 102

STIE BPD Jateng



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi perusahaan yang sudah *go public*, komunikasi data keuangan dan data ekonomi lainnya sangat diperlukan. Dimana para penanam modalnya sudah menyebar ke pelosok daerah dan kegiatan operasinya yang sudah mejangkau secara luas sampai ke luar negeri. Para *stakeholder* atau pemangku kepentingan menghendaki diadakan pengawasan atau pengendalian terhadap perusahaan agar mereka dapat menggunakan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Aryani, 2011).

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang *relevant* dan *reliable*, kegiatan audit sangat diperlukan untuk memeriksa laporan keuangan yang disajikan tersebut (Aryani, 2011). Menurut Mulyadi, secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

Dari hasil kegiatan audit tersebut dihasilkan laporan audit (*audit report*) yang menyatakan pendapat atau opininya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik digunakan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga pengguna informasi keuangan memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan memeriksa opini yang dikeluarkan oleh akuntan publik, pengguna laporan keuangan dapat mengetahui perusahaan mana yang memiliki keadaan keuangan yang wajar dan tidak terdapat kecurangan dalam proses bisnisnya. Sehingga para *stakeholder* atau pemangku kepentingan memperoleh

keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dapat dipercaya untuk dasar keputusan-keputusan yang diambil dan merupakan langkah dalam pengawasan atau pengendalian perusahaan (Linaputri, 2010).

Selain itu BAPPEPAM sebagai badan yang mengawasi perusahaan-perusahaan yang sudah *go public* membuat peraturan yang menerangkan bahwa setiap perusahaan yang sudah *go public* harus menerbitkan laporan keuangan yang sudah diaudit. Kebutuhan-kebutuhan tersebut yang melatarbelakangi perusahaan untuk memakai jasa akuntan publik. Karena jasa akuntan publik merupakan jasa professional, maka perusahaan harus memberikan *fee* kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit (auditor eksternal) terhadap laporan keuangannya (Aryani, 2011).

*Fee* audit bagi auditor merupakan horarium yang diterima atas kegiatan audit yang telah dilakukan. Besarnya *fee* audit yang ditetapkan oleh auditor sangat berpengaruh dalam menarik perusahaan untuk menggunakan jasa auditor tersebut dan mempertahankan klien agar tidak menggunakan Kantor Akuntan Publik lainnya. Auditor akan meningkatkan *fee* audit karena auditor membutuhkan biaya *startup* yang lebih besar karena harus mengaudit satu klien yang baru. Walaupun tidak terlalu berbeda dengan pergantian secara sukarela, di mana auditor dapat berekspektasi bahwa klien tetap akan diaudit lagi pada tahun-tahun setelahnya, pada lingkungan pergantian wajib tidak ada keharusan klien untuk tetap diaudit oleh auditor pengganti. Mereka dapat saja kembali ke auditor yang lama karena kecocokan yang mungkin telah ada sebelum peraturan membatasi hubungan mereka (Adityawati, 2011).

Sampai saat ini tidak terdapat peraturan yang mengatur besarnya *fee* audit yang harus ditagih oleh Akuntan Publik terhadap klien (*auditee*) atas jasa audit yang diberikan. Pada tahun 1990 terdapat suatu gagasan untuk menetapkan pengaturan tentang *fee* audit, khususnya atas jasa audit atas laporan keuangan (Agoes, 1996 dalam Suharli, 2008). Gagasan ini menimbulkan pro dan kontra kalangan praktisi akuntan publik. Kondisi ini memberikan indikasi bahwa selama ini penetapan *fee* audit dilakukan secara subjektif, artinya ditentukan oleh salah satu pihak atau dasar kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dan klien

dalam situasi persaingan sesama akuntan publik. Hal ini memungkinkan penetapan *fee* yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, tergantung kekuatan tawar menawar tersebut (Suharli, 2008).

Menurut Gatot (2010), pasar audit di Indonesia sangat ketat dan tidak hanya didominasi Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big 4* saja. Selain itu, pasar audit di Indonesia juga masih bersifat *cost focus* dibandingkan *brand/quality focus*. Maksudnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan jasa audit kebanyakan masih menggunakan pertimbangan pemilihan KAP melalui *audit fee*-nya daripada nama besar atau kualitas dari KAP tersebut. Perusahaan membayar *fee* audit yang lebih tinggi dengan harapan auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang diaudit (Aryani, 2011).

Pada tanggal 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *fee* audit. Surat keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi akuntan publik dalam menentukan *fee* audit. Dalam bagian lampiran 1 Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *fee* audit dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang diberikan.

Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi besar *fee* audit. Orang yang pertama kali memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee* audit adalah Simunic (1980) dalam Aryani (2011). Ia membuat model yang menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*). Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit.

Menurut Dickins *et al.* (2006) dalam Widiyari (2008) penentuan *fee* audit sebagian merupakan seni dan sebagian yang lain merupakan proses ilmiah. Dikatakan sebuah seni, bahwa penentuan *fee* audit dapat dipengaruhi oleh kecermatan dalam menganalisa perubahan yang signifikan yang terjadi sewaktu-waktu seperti keadaan suatu negara tempat Kantor Akuntan Publik beroperasi sehingga model-model penentuan *fee* audit harus secara periodik diperbaharui.

Sedangkan secara ilmiah struktur *corporate governance* yang mencakup dewan komisaris dan komite audit mempengaruhi penentuan *fee* audit. Kebijakan peraturan dan pedoman praktek *good corporate governance* terus menekankan pentingnya hubungan antara auditor eksternal dengan dewan komisaris (Johl, 2009).

Dalam mekanisme *corporate governance* terjalin hubungan antara pemilik perusahaan, karyawan, pemasok dan berbagai pihak lainnya dengan manajemen perusahaan. Hubungan tersebut menimbulkan adanya masalah keagenan karena adanya pemisahan fungsi dan kontrol. Terdapat dua perspektif yang diperlukan dalam mekanisme *good corporate governance* untuk mengurangi masalah keagenan yang terjadi akibat pemisahan fungsi dan kontrol dan kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan yang mengarah *fee* audit yang lebih tinggi yaitu perspektif permintaan – *based* dan perspektif audit risiko (Goodwin-Stewart, 2006).

Perspektif permintaan – *based* (misalnya Goodwin-Stewart dan Kent, 2006; Abbott *et al.*, 2003; Carcello *et al.*, 2002) menunjukkan hubungan positif antara karakteristik tata kelola perusahaan dengan *fee* audit. Perusahaan dengan struktur *corporate governance* yang kuat mendapat jaminan tambahan dari auditor mereka untuk mempertahankan reputasi mereka dan menghindari potensi litigasi (Abbott *et al.*, 2003; Carcello *et al.*, 2002), sehingga biaya audit yang lebih tinggi. Menurut Kane dan Velury (2002) dalam Johl (2009) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat yang lebih tinggi cenderung untuk memilih perusahaan audit besar. Perusahaan memilih kantor akuntan publik yang besar dengan harapan kantor akuntan publik tersebut memiliki kualitas audit yang lebih tinggi sehingga akan menaikkan *fee* audit yang diberikan (Lifschutz, 2007).

Sedangkan berdasarkan perspektif audit risiko (Yatim *et al.*, 2006) menunjukkan bahwa auditor menganggap tata kelola perusahaan sebagai internal mekanisme kontrol yang mempengaruhi sifat dan tingkat pengujian audit. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang kuat, auditor akan mengurangi penilaian risiko mengaudit mereka. Akibatnya akan mengurangi pengujian audit mereka yang mengarah *fee* audit yang lebih rendah. Oleh karena itu, struktur *corporate governance* memiliki andil dalam penentuan besarnya *fee* audit yang diberikan atas jasa audit tersebut.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance*, yaitu komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Dewan komisaris memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi perusahaan dalam proses pelaporan. Mereka juga harus menilai kualitas *good corporate governance* dalam organisasi dan memastikan bahwa organisasi memiliki sistem yang baik, misalnya praktek-praktek akuntansi yang efektif, pengendalian internal dan manajemen risiko, dan fungsi audit. Oleh karena itu, dewan komisaris berpotensi sebagai elemen penting dalam memberikan kredibel dan laporan keuangan yang *relevan* (Yatim *et al.*, 2006). Tanggung jawab dewan komisaris tersebut dapat mengurangi timbulnya risiko selama kegiatan audit sehingga akan menurunkan besarnya *fee* audit.

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit (Rizqiasih, 2010).

Komite audit memegang peran penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggung jawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, fungsi pengendalian internal, sistem manajemen risiko serta fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit diharapkan mampu menjamin adanya mekanisme *check and balance* sehingga proses pengawasan dan pengelolaan berlangsung secara efektif dengan pemisahan yang jelas antara berbagai fungsi dan peran baik dalam hal akuntabilitas maupun pertanggungjawaban yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan kepada para *shareholders* (Rizqiasih, 2010).

Dengan adanya komite audit tersebut diharapkan terciptanya pengawasan dan pengelolaan yang lebih efektif dari pengawasan dan pengelolaan yang hanya dilakukan oleh dewan komisaris. Dengan pengawasan dan pengendalian dari dua struktur *corporate governance* yang saling melengkapi dapat mengurangi risiko audit dan luasnya wilayah audit sehingga akan mengurangi besarnya *fee* audit yang diberikan.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, seperti Carcello, *et al.* (2002) dalam penelitiannya yang menguji pengaruh antara karakteristik dewan dalam perusahaan dengan *fee* yang dibayarkan untuk auditor eksternal. Karakteristik dewan komisaris yang diteliti meliputi independensi dewan, kerajinan yang meliputi faktor banyaknya rapat pengurus, dan keahlian anggota dewan. Penelitian ini menggunakan sampel dari *Fortune 1000 Companies* dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan positif antara independensi dewan, kerajinan, dan keahlian anggota dewan dengan *fee* audit.

Abbott *et al.* (2003) dalam penelitiannya menguji pengaruh antara karakteristik komite audit dan *fee* audit. Karakteristik komite audit yang diteliti meliputi independensi, keahlian, dan frekuensi pertemuan komite audit. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa komite audit yang terdiri dari direktur independensi dan setidaknya memiliki satu pakar keuangan berhubungan dengan *fee* audit yang lebih tinggi. Dengan kata lain independensi dan keahlian komite

audit berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Sedangkan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negative terhadap besarnya *fee* audit.

Goodwin-Stewart dan Kent (2006) dalam penelitiannya menguji hubungan karakteristik komite audit dan audit internal terhadap kenaikan *fee* audit eksternal. Penelitian ini secara khusus membahas tentang karakteristik komite audit yang meliputi keberadaan, independensi, keahlian, dan pertemuan anggota komite audit, sedangkan audit internal berfokus pada penggunaan fungsi audit internal dalam perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *Australian Stock Exchange* (ASX) pada tahun 2000 dan menggunakan analisis OLS untuk menguji hipotesisnya. Hasil penelitian ini menemukan hubungan positif antara *fee* audit dengan keberadaan dan frekuensi pertemuan komite audit serta penggunaan audit internal, tetapi tidak menemukan hubungan yang signifikan antara *fee* audit dengan independensi dan keahlian komite audit.

Yatim *et al.* (2006) dalam penelitiannya menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, karakteristik dewan komisaris dan karakteristik komite audit. Karakteristik dewan komisaris yang meliputi independensi, ukuran, keberadaan komite manajemen risiko, dan frekuensi pertemuan dewan komisaris. Sedangkan karakteristik komite audit meliputi independen, ukuran, keahlian, dan frekuensi pertemuan anggota komite audit. Dengan sampel 736 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia pada tahun 2003. Peneliti menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara *fee* audit dengan independensi dewan komisaris, keahlian komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit. Sedangkan ukuran dewan komisaris, keberadaan komite manajemen risiko, frekuensi pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, dan keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya *fee* audit eksternal.

Johl *et al.* (2009) dalam penelitiannya menguji hubungan antara *fee* audit dan faktor tata kelola perusahaan, yaitu karakteristik komite audit dan CEO pada 605 perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia. Studi ini secara khusus meneliti hubungan antara biaya audit dan atribut entitas dari CEO (bumiputra atau tidak) dan anggota komite audit. Anggota komite audit diteliti berdasarkan karakteristik

komite audit meliputi proporsi anggota independen, keahlian keuangan, dan pertemuan anggota komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan independensi komite audit secara signifikan terkait dengan biaya audit, sedangkan keahlian keuangan dan frekuensi pertemuan memiliki hubungan negatif dengan biaya audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh karakteristik struktur *corporate governance* terhadap *fee* audit terdapat perbedaan hasil penelitian. Di Indonesia sendiri penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate governance* dengan *fee* audit masih tergolong jarang. Penelitian tersebut terbatas hanya membahas mengenai keberadaan fungsi dari struktur *corporate governance* saja yang berpengaruh terhadap besarnya *fee* audit tanpa memperhatikan karakteristik dari struktur *corporate governance* tersebut. Penelitian tersebut terfokus pada pengaruh ada atau tidak adanya fungsi struktur *corporate governance* yang meliputi adanya fungsi pemegang saham mayoritas, fungsi dewan komisaris, dan fungsi komite audit terhadap *fee* audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et al.*(2006) yang menguji pengaruh antara *fee* audit eksternal, dewan komisaris karakteristik komite audit. Namun penelitian ini menghilangkan variabel komite manajemen risiko dan keetnisan. Variabel komite manajemen risiko dihilangkan karena kesamaan fungsi antara komite manajemen risiko dan komite audit yaitu pengawasan terhadap sistem manajemen risiko, serta dalam sektor manufaktur sebagai objek penelitian belum ada peraturan yang mengatur tentang keberadaan fungsi komite manajemen risiko jadi tidak semua perusahaan manufaktur memiliki komite manajemen risiko. Penghilangan variabel keetnisan karena variabel tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian Yatim *et al.*(2006) membagi perusahaan menjadi dua etnis yaitu etnis Bumiputera (yaitu terdiri dari perusahaan etnis Melayu) dan *Non-Bumiputera* (yaitu terdiri dari perusahaan selain etnis Melayu).

Penelitian ini akan melakukan pengujian kembali dengan menguji pengaruh karakteristik struktur *corporate governance* meliputi karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap *fee* audit. Penelitian ini menambah



periode yang diamati dari 1 tahun menjadi 3 tahun dengan alasan untuk mencerminkan data yang lebih baik/ valid dengan memperpanjang periode namun tidak terlalu panjang karena dapat menyebabkan data menjadi bias dan penyesuaian terhadap penelitian sebelumnya. Periode penelitian memilih tahun 2008 sampai tahun 2010, dengan harapan lebih mencerminkan kondisi saat ini. Penelitian ini memfokuskan pada sektor manufaktur, karena perusahaan manufaktur merupakan bidang perusahaan mayoritas di Indonesia dan memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap perekonomian.

Karakteristik struktur *corporate governance* yang diteliti dalam penelitian ini meliputi independensi dewan komisaris dan komite audit, jumlah dewan komisaris dan komite audit, frekuensi pertemuan dewan komisaris dan komite audit, dan keahlian komite audit. Dari perspektif auditor, dewan komisaris yang independen, rajin (sering mengadakan pertemuan atau rapat), dan memiliki anggota lebih sedikit diharapkan dapat mengurangi penilaian auditor terhadap risiko pengendalian serta luasnya prosedur audit sehingga dapat mengurangi *fee* audit (Rizqiasih, 2010). *The Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Goodwin-Stewart (2006) merekomendasikan bahwa komite audit yang independen, rajin, ahli, dan berjumlah banyak merupakan langkah yang baik untuk mengevaluasi pihak manajemen dan praktik pelaporan keuangan sehingga akan mengurangi tingkat risiko audit dan berakibat menurunkan besarnya *fee* audit eksternal.

Penelitian ini menekankan pada perspektif audit risiko, yaitu dengan *good corporate governance* yang kuat auditor akan mengurangi penilaian risiko audit sehingga mengurangi pengujian audit yang mengarah kepada *fee* audit yang lebih rendah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mengambil judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FEE AUDIT”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian berupa hubungan antara berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ada dalam perusahaan dan kontribusinya terhadap proses auditing dan *fee* audit, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. apakah ada pengaruh antara independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit?
- b. apakah ada pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap *fee* audit?
- c. apakah ada pengaruh antara intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit?
- d. apakah ada pengaruh antara independensi komite audit terhadap *fee* audit?
- e. apakah ada pengaruh antara ukuran komite audit terhadap *fee* audit?
- f. apakah ada pengaruh antara intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit?
- g. apakah ada pengaruh antara keahlian komite audit terhadap *fee* audit?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. untuk mengetahui pengaruh antara independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit,
- b. untuk mengetahui pengaruh antara jumlah dewan komisaris terhadap *fee* audit,
- c. untuk mengetahui pengaruh antara intensitas pertemuan dewan komisaris terhadap *fee* audit,
- d. untuk mengetahui pengaruh antara independensi komite audit terhadap *fee* audit,
- e. untuk mengetahui pengaruh antara jumlah komite audit terhadap *fee* audit,
- f. untuk mengetahui pengaruh antara intensitas pertemuan komite audit terhadap *fee* audit, dan

g. untuk mengetahui pengaruh antara keahlian komite audit terhadap *fee* audit.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berkaitan dengan teori bagi :

###### **a. Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan penulis yang berkaitan dengan pengaruh antara dewan komisaris dan komite audit dalam struktur *corporate governance* terhadap *fee* audit.

###### **b. Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi pihak lain yang membutuhkan bila ingin mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan pengaruh antara dewan komisaris dan komite audit dalam struktur *corporate governance* terhadap *fee* audit. Serta penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai karakteristik struktur *governance* apa saja yang berpengaruh terhadap *fee* audit eksternal, sehingga perusahaan dapat mengontrol dan mengendalikan faktor-faktor yang menentukan besarnya *fee* audit eksternal.

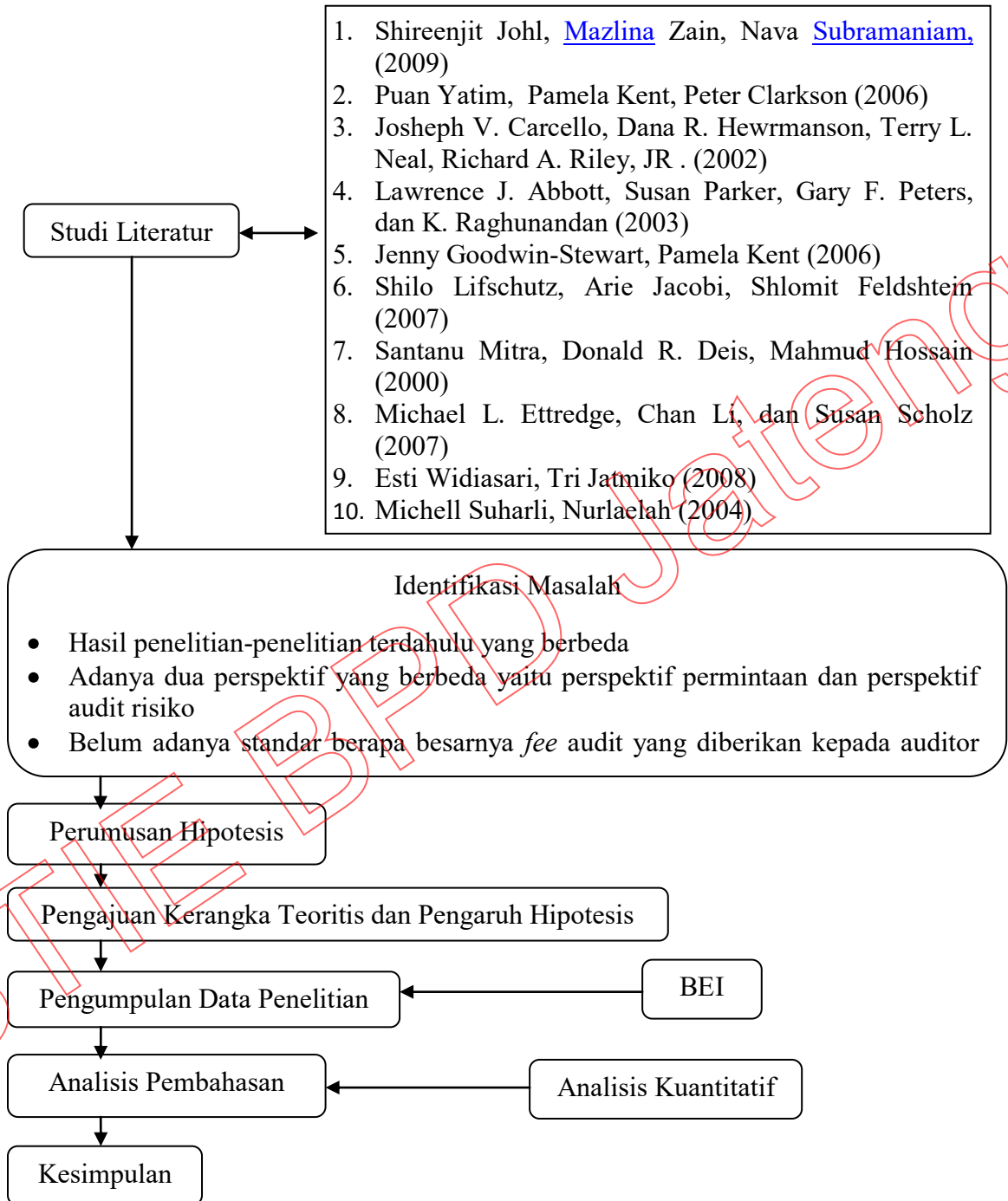
##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh praktisi manajemen perusahaan, analisis keuangan, investor, dan kreditur dalam melakukan investasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan perusahaan mengenai pentingnya penerapan *good corporate governance*. Dengan penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Selain itu penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

#### **1.5 Kerangka Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Kerangka Penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang penjabaran konsep-konsep dari variabel yang digunakan, serta literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Konsep-konsep tersebut diperoleh melalui sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, maupun situs-situs internet yang mendukung. Tinjauan pustaka berisi tentang teori yang meliputi teori keagenan, *fee* audit, risiko audit, *corporate governance*, dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit.

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan landasan bagi penerapan *corporate governance* sebagai suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian. Teori keagenan memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* bagi para pemegang saham akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya, maupun *shareholders* pada khususnya (Widiasari, 2008).

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa *agency theory* merupakan ketidaksamaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Teori ini membahas tentang hubungan keagenan di mana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) (Rizqiasih, 2010).

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama, adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan dari *principal* dan *agent* berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh *agent*.

Permasalahannya adalah *principal* tidak dapat memverifikasi apakah *agent* telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua, adalah masalah pembagian risiko yang timbul pada saat *principal* dan *agent* mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda yang dikarenakan adanya perbedaan preferensi terhadap risiko (Eisenhardt, 1989 dalam Rizqiasih, 2010).

Eisenhardt dalam Widiyari (2008) menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh tiga asumsi antara lain : 1) asumsi sifat manusia (*human assumption*) yang dikelompokkan menjadi *sec interest*, *bounded rationality* serta *risk aversion*. 2) asumsi keorganisasian (*organization assumptions*) dikelompokkan menjadi konflik sebagai tujuan antara partisipan, efisiensi sebagai suatu kriteria efektivitas dan simetri informasi. 3) asumsi informasi (*information assumption*).

Teori keagenan menekankan pada penentuan pengaturan kontrak yang efisiensi dalam hubungan pemilik dan *agent*. Kontrak yang efisien adalah kontrak yang jelas untuk masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban sehingga dapat meminimumkan konflik keagenan. Teori keagenan memainkan peran penting dalam hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Dalam hubungan tersebut sering kali terdapat masalah *agency*, dan masalah *agency* yang menjadikan perhatian penting adalah proses pengambilan keputusan karena terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan dan pengawasan dalam perusahaan. Pemisahan fungsi manajemen yang melakukan perencanaan dan implementasi terhadap kebijakan perusahaan serta fungsi pengendalian yang melakukan verifikasi dan monitoring terhadap keputusan penting dalam organisasi akan memunculkan konflik kepentingan diantara pihak-pihak tersebut (Widiyari, 2008).

### 2.1.2 Fee Audit

Jasa akuntan publik merupakan jasa profesional, maka perusahaan harus memberikan *fee* kepada akuntan publik yang melakukan jasa audit terhadap laporan keuangan (Aryani, 2011). Simunic (2006) dalam Rizqiasih (2010) menyatakan bahwa *fee* audit ditentukan oleh faktor dalam penugasan audit seperti besar kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*), kompleksitas jasa audit yang dihadapi auditor, risiko audit (atas dasar *current ratio*, *quick ratio*, D/E, *litigation risk*) dan kompleksitas audit (*subsidiaries*, *foreign listed*) serta nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan jasa audit.

Pada tanggal 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit*. Surat keputusan ini diterbitkan dengan tujuan sebagai panduan bagi profesi akuntan publik dalam menentukan *fee audit*. Dalam bagian lampiran 1 Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit* dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang diberikan.

Berdasarkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/VII/2008 tersebut dijelaskan bahwa :

- a. prinsip dasar dalam menetapkan imbalan jasa (*fee*) audit, Akuntan Publik harus memperhatikan tahapan-tahapan di atas dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
  - 1) kebutuhan klien,
  - 2) tugas dan tanggung jawab menurut hukum (*statutory duties*)
  - 3) independensi

- 4) tingkat keahlian (*level of expertise*) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan,
  - 5) banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Akuntan Publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, dan
  - 6) basis penetapan *fee* yang disepakati.
- b. imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan.
  - c. imbalan jasa audit harus mencerminkan secara wajar pekerjaan yang dilakukan untuk klien dan seluruh faktor yang dikemukakan (dalam hal ini anggota harus memperhatikan Kode Etik Profesi yang mengatur mengenai independensi). Anggota tidak diperkenankan menetapkan imbalan jasa berbasis kontijensi baik langsung atau tidak langsung.
  - d. sebelum perikatan disepakati, anggota sudah harus menjelaskan kepada klien, basis pengenaan imbalan jasa, cara dan termin pembayaran, dan total imbalan jasa yang akan dikenakan.
  - e. dalam hal kemungkinan besar imbalan jasa akan meningkat secara substansial di masa datang, klien harus sudah diberitahukan sebelumnya.
  - f. imbalan jasa atas pekerjaan pertama yang diberikan kepada klien tidak boleh didiskon sebagai imbalan jasa perkenalan, dengan maksud untuk mengenakan imbalan jasa lebih tinggi atau pemberian jasa lainnya di masa datang. Anggota harus dapat menunjukkan bahwa pekerjaannya dilakukan secara profesional dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan, dan memenuhi kebutuhan klien
  - g. untuk organisasi nirlaba dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa dengan harga khusus sepanjang imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa.



- h. untuk mempertahankan independensinya, anggota sudah harus menerima imbal jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan sebelum memulai pekerjaan untuk periode berikutnya.
- i. anggota yang imbal jasanya belum dibayar boleh menahan dokumen tertentu milik klien yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaannya, dan boleh menolak untuk meneruskan informasi yang dimilikinya kepada klien atau auditor/ akuntanpenerus sebelum imbal jasanya dibayar.
- j. anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.
- k. tarif imbal jasa (*charge-out rate*) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing.
- l. tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan :
  - 1) gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian,
  - 2) imbalan lain di luar gaji
  - 3) beban *overhead*, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan,
  - 4) jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (*projected charge-out time*) untuk staf profesional dan staf pendukung, dan
  - 5) margin laba yang pantas.
- m. tarif imbalan jasa per-jam (*hourly charge-out rates*) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manager) dan partner.
- n. pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan *time sheet* yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbal jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan efektifitas

pekerjaan. *Time sheet* sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan pasar dari pengukuran kinerja.

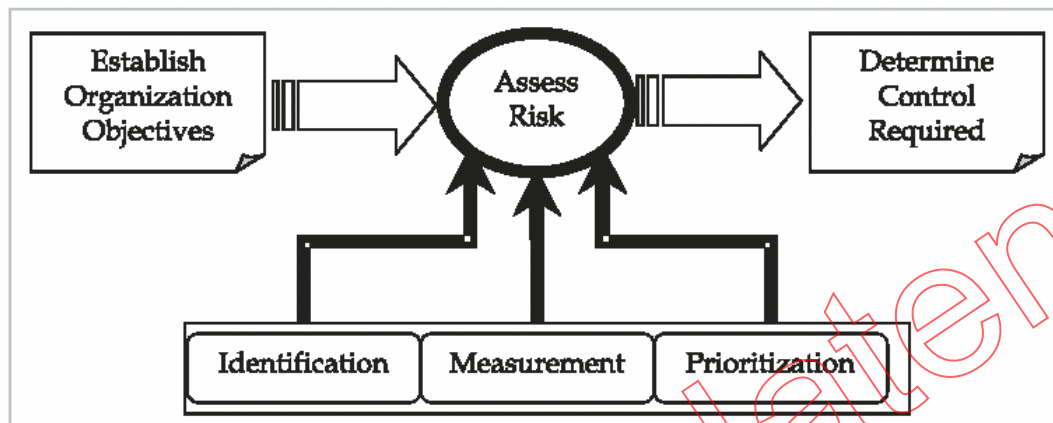
- o. praktek yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.

### 2.1.3 Risiko Audit

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko auditor. Menurut SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya, atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit dan materialitas mempengaruhi penerapan standar auditing, khususnya standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, serta tercermin dalam laporan auditor bentuk baku. Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain, perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

Dalam perencanaan audit, auditor harus mempertimbangkan risiko audit dan materialitas. Auditor harus merencanakan auditnya sedemikian rupa, sehingga risiko audit dapat dibatasi pada tingkat yang rendah, yang menurut pertimbangan profesionalnya, memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Risiko audit dapat ditentukan dalam ukuran kuantitatif atau kualitatif. Dalam mempertimbangkan risiko audit, auditor harus secara khusus menaksir risiko salah saji material dalam laporan keuangan sebagai akibat dari kecurangan. Auditor harus mempertimbangkan dampak penaksiran tersebut atas strategi audit menyeluruh dan pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan. Risiko tinggi dapat menyebabkan auditor memperluas prosedur yang diterapkan, atau memodifikasi sifat prosedur untuk memperoleh bukti yang lebih bersifat persuasive (PSA No. 25).

Salah satu model *Risk Based Auditing* yang dapat digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissions (COSO)*. Model COSO menunjukkan hubungan antara risiko organisasi dengan perencanaan audit, yaitu:



Gambar 2.1  
Model COSO

Model di atas jelas menunjukkan bahwa penentuan pengendalian yang dibutuhkan oleh organisasi harus melalui tahapan penilaian risiko (*risk assessment*). Pengendalian yang telah berorientasi kepada risiko akan lebih efektif karena jelas risiko terkait yang akan diminimalisasi (*mitigate*). Pengendalian intern yang telah berorientasi kepada risiko akan memberikan tingkat keyakinan yang lebih tinggi kepada auditor atas efektivitas pengendalian tersebut. Semakin efektif pengendalian maka audit juga akan menjadi semakin efisien dan efektif (Widarsono, 2004).

Berdasarkan SA Seksi 312 Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit, pada tingkat saldo akun atau golongan transaksi, risiko audit terdiri dari (a) risiko [yang meliputi risiko bawaan (*inherent risk*) dan risiko pengendalian (*control risk*)] bahwa saldo akun atau golongan transaksi mengandung salah saji (disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan) yang dapat menjadi material terhadap laporan keuangan apabila digabungkan dengan salah saji pada saldo akun atau golongan transaksi lainnya, dan (b) risiko [risiko deteksi

(*detection risk*)] bahwa auditor tidak akan mendeteksi salah saji tersebut. Pembahasan berikut menjelaskan risiko audit dalam konteks tiga komponen risiko di atas :

a. Risiko Bawaan

Risiko bawaan adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terkait. Risiko salah saji demikian adalah lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tertentu dibandingkan dengan yang lain. Sebagai contoh, perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Uang tunai lebih mudah dicuri daripada sediaan batu bara.

b. Risiko Pengendalian

Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Risiko ini merupakan fungsi efektivitas desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian intern.

c. Risiko Deteksi

Risiko deteksi adalah risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi merupakan fungsi efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada, walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam itu timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian lain ini

dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu.

#### 2.1.4 *Corporate Governance*

Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan (Darmawati dkk., 2004 dalam Linoputri, 2010).

##### 2.1.4.1 Pengertian *Corporate Governance*

Kata *corporate governance* terdiri dari 2 kata, yaitu *corporate* yang berarti perusahaan dan *governance* dari kata *gubernare* berarti *to steer*, mengendalikan, memberi arahan. Secara kasar, *corporate governance* berarti tata kelola perusahaan (Aryani, 2011).

Berdasarkan definisi oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yang sesuai dengan definisi *Cadbury Committee*, *corporate governance* didefinisikan sebagai “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan” (Setyaningrum, 2005).

*Center for European Policy Studies (CEPS)* dalam Rizqiasih (2010) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seluruh sistem yang dibentuk mulai dari hak (*right*), proses, serta pengendalian, baik yang ada di dalam maupun di luar manajemen perusahaan. Dalam definisi ini, hak merupakan hak seluruh *stakeholders* untuk mempengaruhi manajemen. Proses, merupakan mekanisme dari hak-hak *stakeholders* serta pengendalian merupakan mekanisme yang memungkinkan *stakeholders* menerima informasi yang diperlukan seputar kegiatan perusahaan.

Sedangkan pengertian *Good Corporate Governance* dari segi *soft definition* menurut BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), yaitu “komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika” (Aryani, 2011).

*Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. Baik (*Good*) adalah tingkat pencapaian terhadap suatu hasil upaya yang memenuhi persyaratan, menunjukkan kepatutan dan keteraturan operasional perusahaan sesuai dengan konsep *Corporate Governance*. Sistem adalah prosedur formal dan informal yang mendukung struktur dan strategi operasional dalam suatu perusahaan. Proses adalah kegiatan mengarahkan dan mengelola bisnis yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, menyelaraskan perilaku perusahaan dengan ekspektasi dari masyarakat, serta mempertahankan akuntabilitas perusahaan kepada pemegang saham (Aryani, 2011).

Menurut Aryani (2011) definisi dari struktur *corporate governance* adalah :

- a. susunan atau rangka dasar manajemen perusahaan yang didasarkan pada pendistribusian hak-hak dan tanggung jawab di antara organ perusahaan (dewan komisaris, direksi dan RUPS/pemegang saham) dan *stakeholder* lainnya, dan
- b. aturan-aturan maupun prosedur-prosedur untuk pengambilan keputusan dalam hubungan perusahaan.

#### 2.1.4.2 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*

menguraikan empat prinsip dalam *corporate governance* (FCGI, 2000 dalam Linaputri, 2010), yaitu :

##### a. *Fairness* (keadilan)

*Fairness* menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor. Prinsip *fairness* diharapkan untuk membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*) sehingga terdapat perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Penegakan prinsip *fairness* mensyaratkan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten, dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif.

##### b. *Transparency* (transparansi)

*Transparency* mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan. Prinsip *transparency* diharapkan dapat membantu *stakeholders* dalam menilai risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan serta meminimalisasi adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen.

##### c. *Accountability* (akuntabilitas)

Prinsip *accountability* menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Beberapa bentuk implementasi dari prinsip *accountability* adalah adanya praktek audit internal yang efektif serta kejelasan fungsi, hak, dan kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (target pencapaian perusahaan di masa depan). Apabila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak

kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi.

d. *Responsibility* (pertanggungjawaban)

*Responsibility* memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial. Penerapan prinsip ini diharapkan membuat perusahaan menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung masyarakat.

2.1.4.3 Manfaat *Corporate Governance*

Berdasarkan Rizqiasih (2010) mekanisme *Corporate Governance* memiliki beberapa manfaat yaitu :

- a. mengurangi *agency cost*, yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*) sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- b. mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- c. menciptakan dukungan para *stakeholders* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

2.1.5 Dewan Komisaris

Menurut UU PT No 40, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas mengawasi pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Sedangkan menurut Egon Zehnder, dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada



pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan, sedangkan dewan komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen maka dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan (Egon Zehnder International, 2000 hal.12-13 dalam Pujiastuti, 2010).

Berkenaan dengan bentuk dewan dalam sebuah perusahaan, terdapat dua sistem yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Anglo Saxon* dan *Kontinental Eropa*. Sistem hukum *Anglo Saxon* mempunyai Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*. Di sini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen yang bekerja dengan prinsip paruh waktu (non direktur eksekutif). Negara-negara dengan *One Tier System* misalnya Amerika Serikat dan Inggris (Setyarini, 2011).

Sistem Hukum *Kontinental Eropa* mempunyai Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*. Di sini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahannya dan pengawasan dewan komisaris. Dalam sistem ini, anggota dewan direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (dewan komisaris). Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sehingga dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan komisaris diangkat dan diganti dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara-negara dengan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, dan Jepang. Karena sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda, maka hukum perusahaan Indonesia menganut *Two Tiers System* untuk struktur dewan dalam perusahaan (Setyarini, 2011).

Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan komisaris dalam FCGI meliputi:

- a. menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;
- b. menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil;
- c. memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
- d. memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan di mana perlu;
- e. memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan. (*OECD Principles of Corporate Governance* dalam Pujiastuti, 2010).

#### 2.1.6 Komisaris Independen

Fama dan Jensen (1983) dalam Yatim *et al* (2006) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manager internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Adanya unsur komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaan biasanya beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan berfungsi untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Aryani, 2011).

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEI tanggal 1 Juli 2000. Dinyatakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus mempunyai komisaris independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas. Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris. Berdasarkan peraturan tersebut terdapat kriteria tentang komisaris independen adalah sebagai berikut (BEJ, 2000 dalam Rizqiasih, 2010):

- a. komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b. komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/ atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c. komisaris independen tingkat kedudukan rangkap pada perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d. komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e. komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan saham pengendali dalam Rapat Umum pemegang Saham (RUPS).

Sedangkan kriteria komisaris independen menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (2000) dalam Rizqiasih (2010) antara lain :

- a. komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
- b. komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan.
- c. komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak diperkerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula diperkerjakan

dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.

- d. komisaris independen bukan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
- e. komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
- f. komisaris independen tidak memiliki kontrak kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
- g. komisaris independen harus beda dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan yang dapat atau secara wajar dapat dianggap sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.

#### 2.1.7 Komite Audit

Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New York Stock Exchange* (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional ini, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi

membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris/pengawasan (Rizqiasih, 2010).

Tujuan dibentuknya komite audit meliputi aspek-aspek sebagai berikut (Rizqiasih, 2010):

a. Penyusunan Laporan Keuangan

Meskipun direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab terutama atas penyusunan laporan keuangan dan auditor eksternal bertanggung jawab atas audit eksternal laporan keuangan, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal.

b. Manajemen Risiko dan Kontrol

Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggung jawab atas manajemen risiko dan kontrol, komite audit memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol.

c. *Corporate Governance*

Meskipun direksi dan dewan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan *corporate governance*, namun komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance*. (Putri, 2010)

## 2.2 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungan, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Sekaran, 2006: 135 dalam Harjanti, 2011).

### 2.2.1 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Fee Audit*

Independensi dewan komisaris dapat tercipta dengan adanya komisaris independen dalam keanggotaan dewan komisaris. Komisaris independen merupakan pihak pengawas yang efektif dikarenakan tidak mempunyai kepentingan finansial dalam perusahaan serta tidak mempunyai hubungan psikologis dengan pihak manajemen sehingga diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Komisaris independen juga berada dalam posisi yang baik untuk secara obyektif dalam menantang kinerja manajemen dalam artian melakukan pengawasan (*oversight*) terhadap kinerja manajemen secara berkesinambungan (Boo dan Sharma, 2008 dalam Rizqiasih, 2010).

Menurut Fama *et al.* (1980) dalam Carcello *et al.* (2002), para dewan komisaris yang independen akan melakukan perlindungan terhadap reputasi mereka dihadapan para pemegang saham dengan pengawasan yang lebih unggul. Dewan komisaris yang independen akan melakukan pengawasan yang lebih unggul sehingga reliabilitas dan validitas pelaporan keuangan yang lebih baik dapat dicapai (Beasley, 1996 dalam Yatim *et al.*, 2006). Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor yang mengarah kepada *fee audit* yang lebih rendah, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee audit***

### 2.2.2 Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris terhadap *Fee Audit*

Menurut pedoman umum *Good Corporate Governance* Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan, jumlah dewan direksi dan dewan komisaris berbeda-beda.

Jumlah dewan yang besar dapat memberikan keuntungan ataupun kerugian dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris akan berdampak pula terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004).

Lipton dan Lorsch (1992) dan Jensen (1993) dalam Yatim *et al.* (2006) berpendapat bahwa terdapat kesulitan dalam mengorganisasi dan mengkoordinasi dewan komisaris yang berjumlah banyak. Hasil penelitian Beasley (1996) dalam Yatim *et al.* (2006) mengindikasikan jika jumlah dewan komisaris meningkat, kemungkinan kecurangan dalam laporan keuangan juga meningkat. Apabila jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh dalam proses pelaporan keuangan maka hal tersebut mempengaruhi proses audit juga. Jika dewan komisaris yang berjumlah banyak kurang efektif dalam hal pengawasan pelaporan keuangan, maka eksternal auditor perusahaan menaksir pengendalian lingkungan sangat lemah, sehingga waktu audit yang dibutuhkan lebih lama yang berakibat pada tingginya *fee* audit eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> = Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit**

### 2.2.3 Pengaruh Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris terhadap *Fee* Audit

Cotter *et al.* (1998) dalam Setyarini (2011) mengatakan bahwa frekuensi *meeting* dewan komisaris merupakan sumber yang penting untuk menciptakan efektivitas dari dewan komisaris. Selain itu, aktivitas dewan (frekuensi *meeting*) yang tinggi akan menghasilkan *monitoring* yang baik dari dewan, maka anggota secara tidak langsung akan meminta *meeting* dewan untuk diadakan lebih sering untuk menambah kemampuan mereka dalam memonitor manajemen. Keuntungan sering diadakannya *meeting* oleh dewan komisaris yaitu anggota dewan dapat mempunyai tambahan waktu untuk membicarakan, menentukan strategi apa yang akan diambil oleh perusahaan, dan memonitor manajemen.

Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa dewan komisaris yang lebih independen, memiliki anggota lebih sedikit, dan sering mengadakan rapat akan menambah fungsi internal *governance* dan *environment control* serta mengurangi penilaian risiko oleh auditor terhadap proses pelaporan keuangan sehingga berpengaruh terhadap *fee* audit yang lebih rendah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> = Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

#### 2.2.4 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap *Fee* Audit

Sesuai dengan pendekatan berbasis risiko untuk jasa audit (praktik tata kelola perusahaan yang baik akan menurunkan *fee* audit eksternal), suatu komite audit yang independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan (Abbott *et al.*, 2004). Komite audit yang independen akan lebih baik dalam hal perlindungan reliabilitas proses akuntansi dan memajukan objektivitas dari komite audit. Hal ini akan memperkuat pengendalian internal dan mengarah kepada berkurangnya risiko pengendalian. Oleh karena itu pengujian substantif dapat dikurangi sehingga diharapkan dapat memperkecil *fee* audit (Rizqiasih, 2010). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

#### 2.2.5 Pengaruh Jumlah Komite Audit terhadap *Fee* Audit

Jumlah komite audit meningkatkan status organisasi komite audit. Komite audit yang lebih besar dilegitimasi oleh dukungan organisasi dari dewan direksi dengan demikian lebih berwibawa oleh auditor eksternal maupun oleh fungsi audit internal perusahaan. Oleh karena itu, jumlah komite audit yang lebih besar kemungkinan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sehingga menurunkan *fee* audit eksternal (Rizqiasih, 2010).



Braoitta (2000) dalam Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa rekomendasi jumlah komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit. Sesuai dengan rekomendasi dari *The Blue Ribbon Committee* (1999), penelitian ini berpendapat bahwa komite audit yang lebih besar akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang berakibat pada rendahnya *fee* audit eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>5</sub> = Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

#### 2.2.6 Pengaruh Intensitas Pertemuan Komite Audit terhadap *Fee* Audit

Menurut NACD (2000) dalam Abbott *et al.* (2004) merekomendasikan dan menemukan bahwa frekuensi pertemuan adalah penting untuk menunjukkan efektivitas komite audit. Secara keseluruhan, struktur komite audit yang sesuai dengan rekomendasi *The Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Yatim *et al.* (2006) akan memperkuat efektivitas komite audit dalam fungsi pengawasan.

Komite audit yang lebih sering bertemu cenderung untuk mendapat informasi lebih baik dan akan lebih baik dalam melaksanakan tanggung jawab mereka (Goodwin-Stewart dan Kent, 2006). Dengan mengadakan pertemuan dan berkomunikasi lebih sering dengan eksternal auditor, komite audit dapat memperingatkan auditor pada masalah tertentu yang membutuhkan perhatian lebih dari auditor. Konsisten dengan pendekatan berbasis risiko atas jasa audit, maka komite audit yang lebih sering bertemu diharapkan akan mengurangi masalah pelaporan keuangan yang mengarah kepada *fee* audit eksternal yang lebih rendah (Yatim, *et al.*, 2006). Berdasarkan pembahasan tersebut, maka terbentuk hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>6</sub> = Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

### 2.2.7 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap *Fee* Audit

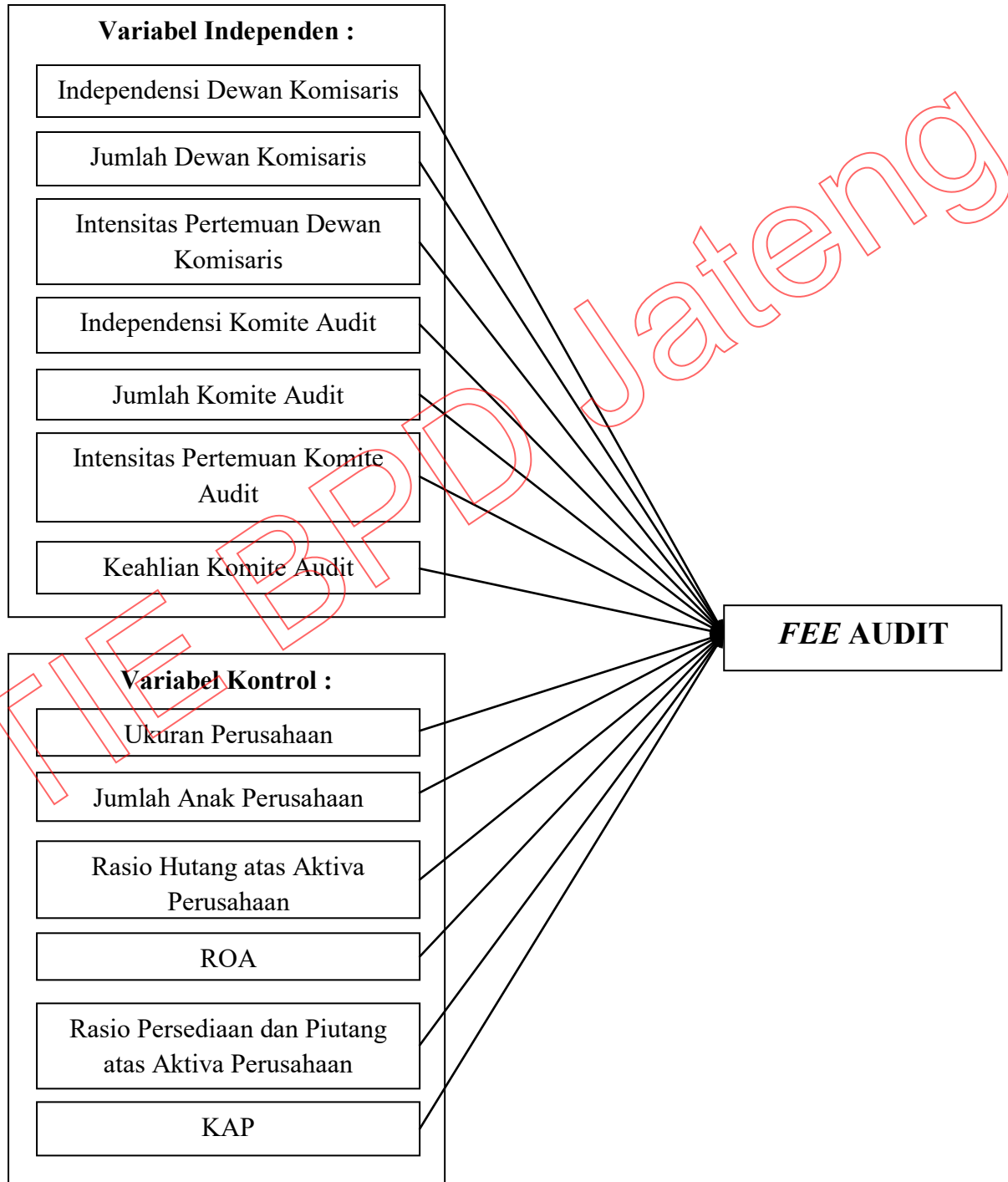
Efektivitas komite audit lebih ditingkatkan jika anggota audit komite memiliki keahlian akuntansi dan keuangan. Hal ini karena anggota komite audit benar-benar memahami tanggung jawab mereka dan memiliki keahlian keuangan dapat lebih fasih dengan laporan keuangan dan operasional serta isu-isu dalam menjalankan tugas pengawasan mereka (Johl *et al.* (2009).

Keahlian komite memungkinkan untuk lebih memahami masalah dan risiko audit, dan prosedur audit yang diusulkan untuk mengatasi dan mendeteksi masalah dan risiko yang timbul. Sehingga keahlian komite audit mengurangi penilaian risiko yang terkait dengan proses pelaporan keuangan, sehingga lebih rendahnya biaya audit eksternal (De Zoort *et al.*, 2001 dalam Yatim *et al.*, 2006). Berdasarkan sisi risiko audit yang dihadapi, maka terbentuklah hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>7</sub> = Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

### 2.3 Model Penelitian

Gambar 2.1  
Model Penelitian



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan definisi yang paling penting bagi suatu penelitian karena definisi ini dipergunakan untuk memberikan suatu gambaran mengenai topik penelitian.

Dalam penelitian ini konsep yang dikemukakan adalah berkaitan dengan definisi data variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Variabel kontrol digunakan sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen. Adapun definisi-definisi dari variabel tersebut adalah :

##### 3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ialah *fee* audit. Menurut Iskak (1999) dalam Suharli (2008) *fee* audit adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan *auditee* atas jasa yang dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan.

##### 3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah :

###### a. Independensi Dewan Komisaris

Independensi dewan komisaris adalah tidak memiliki hubungan psikologis dan ekonomi pada perusahaan (Johl *et al.*, 2009). Komite berpendapat bahwa masalah independensi dewan komisaris memerlukan keseimbangan antara objektivitas, profesionalisme, dan mengambil risiko perusahaan. Keseimbangan

ini diperlukan karena dewan komisaris memiliki fungsi ganda yang dapat bertabrakan pada waktu perumusan kebijakan bisnis perusahaan dan pengawasan manajemen perusahaan (Lifschutz *et al.*, 2007).

b. Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan tugasnya (Aryani, 2011). Jumlah dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi (Syakhroza, 2004).

c. Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris

Intensitas pertemuan dewan komisaris merupakan ketekunan dewan komisaris dalam meningkatkan tingkat pengawasan dari proses laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab dewan komisaris (Yatim *et al.*, 2006). Menurut Lipto *et al.*, (1999) dalam Carcello *et al.*, (2002) menyatakan bahwa menurunnya tingkat efektivitas dewan komisaris dapat diatasi dengan cara meningkatkan jumlah rapat dewan komisaris.

d. Independensi Komite Audit

Menurut *The Blue Ribbon Committee* (1999), independensi telah didefinisikan sebagai tidak ada hubungan dengan anggota perusahaan yang dapat mengganggu pelaksanaan independensi mereka dari manajemen dan perusahaan. Dengan demikian, akan ada objektivitas yang lebih besar dan kesediaan untuk memastikan proses pelaporan keuangan adalah valid dan laporan keuangan memberikan pandangan yang adil dari perusahaan (Johl *et al.*, 2009).

e. Jumlah Komite Audit

Jumlah komite audit adalah jumlah seluruh anggota komite audit yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan yang melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan tugasnya (Aryani, 2011). Braoitta (2000)

dalam Yatim *et al.* (2006) menyatakan bahwa rekomendasi jumlah komite audit konsisten dengan keinginan untuk meningkatkan status organisasi komite audit.

f. Intensitas Pertemuan Komite Audit

Intensitas pertemuan merupakan tanda ketekunan komite audit. Intensitas pertemuan adalah jumlah pertemuan rutin yang diselenggarakan antara komite audit dan auditor eksternal agar komite audit tetap berkomunikasi dan mengetahui tentang masalah audit dan akuntansi (*The Blue Ribbon Committe*, 1999 dalam Abbott *et al.*, 2003).

g. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit adalah komite audit yang memiliki pengetahuan pada bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Keahlian memungkinkan anggota komite audit untuk lebih memahami masalah audit, risiko, dan prosedur audit yang diusulkan untuk mengatasi masalah dan risiko (Abbott *et al.*, 2003).

### 3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol digunakan sebagai pengontrol variabel independen untuk dapat menjelaskan keberadaan variabel dependen, serta untuk mengembangkan *baseline model* atau model dasar bagi *fee* audit sebagaimana digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dasar keputusan pemakaian variabel kontrol adalah untuk menghindari adanya unsur bias hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian dengan menggunakan variabel kontrol akan meminimalisasi bias dibandingkan dengan penelitian tanpa menggunakan variabel kontrol.

a. Ukuran Perusahaan

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan arus kas positif dan prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba (Rizqiasih, 2010).

b. Jumlah Anak Perusahaan

Anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan klien Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Menurut Beams dalam Halim (2005), apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan *reasurement* dan atau membuat laporan transaksi yang kemudian membuat laporan konsolidasinya.

c. *Leverage*

*Leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang. Semakin besar rasio *leverage* maka semakin buruk keadaan keuangan sebuah perusahaan, hal ini disebabkan semakin besarnya pendanaan perusahaan yang berasal dari hutang, jadi semakin tinggi pula risiko keuangan yang akan ditanggung oleh perusahaan (Setyarini, 2011). Besarnya risiko yang ditanggungkan akan menyebabkan lamanya kegiatan audit sehingga menyebabkan besarnya *fee* audit.

d. *Return of Assets*

ROA merupakan rasio untuk mengukur *turnover* asset atas investasi yang dilakukan perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan ROA tinggi akan membayar *fee* yang lebih rendah dengan tetap konsisten dengan *auditorclient risk sharing* (Crasswell dan Fancis dalam Halim, 2005).

e. Rasio Persediaan dan Piutang atas Aset Perusahaan

Aset tertentu dipandang lebih berisiko ketika diaudit dan menyebabkan *fee* audit yang lebih tinggi. Simunic (1980) dalam Rizqiasih (2010) menyatakan bahwa persediaan dan piutang merupakan akun yang lebih sulit diaudit daripada akun yang lain.

f. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik *Big 4* dipandang menghasilkan tingkat kualitas audit yang melebihi persyaratan minimal keprofesionalan dan kualitas dari Kantor Akuntan Publik yang tidak memiliki nama besar (Francis dan Krishnan dalam Rizqiasih, 2010). Kantor Akuntan Publik atau auditor yang berkualitas tinggi

membuat sedikit kesalahan daripada auditor yang berkualitas rendah sehingga memiliki *fee* audit yang lebih tinggi dari auditor yang berkualitas rendah (Diacon dalam Rizqiasih, 2005). Kantor AKuntan Publik yang termasuk dalam *The Big 4* adalah :

- 1) KAP Purwantono, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernst dan Young (E & Y).
- 2) KAP Haryanto Sahari & Co. yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers (PwC).
- 3) KAP Osman Bing Satrio & Co. yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Thomatsu (DTT).
- 4) KAP Siddharta, dan Widjaja yang berafiliasi dengan Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG).

### 3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah cara menemukan dan mengukur variabel-variabel dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.

#### 3.2.1 Variabel Dependen

Data tentang *fee* audit akan diwakili oleh akun *professional fees* yang terdapat dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang selanjutnya variabel akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari *professional fees*. Dasar pengambilan keputusan ini adalah belum tersedianya data tentang *fee* audit dikarenakan pengungkapan data tentang *fee* audit di Indonesia masih berupa *voluntary disclosures* (pengungkapan sukarela), sehingga belum banyak perusahaan yang mencantumkan data tersebut di dalam *annual report*.

#### 3.2.2 Variabel Independen

Variabel independent dalam penelitian ini diukur dengan :



a. Independensi Dewan Komisaris

Independensi dewan komisaris diukur dengan melihat jumlah total komisaris independen yang ada dalam keanggotaan dewan komisaris. Jumlah komisaris independen didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

b. Jumlah Dewan Komisaris

Jumlah dewan komisaris diukur melalui jumlah total anggota dewan komisaris yang ada pada perusahaan. Jumlah dewan komisaris didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

c. Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris

Intensitas pertemuan dewan komisaris diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan anggota dewan komisaris selama periode akuntansi. Jumlah rapat dewan komisaris didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

d. Independensi Komite Audit

Independensi komite audit diukur dengan melihat jumlah total komisaris independen yang ada dalam keanggotaan komite audit. Jumlah komite audit didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

e. Jumlah Komite Audit

Jumlah komite audit diukur melalui jumlah total anggota komite audit yang ada pada perusahaan. Jumlah anggota komite audit didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

f. Intensitas Pertemuan Komite Audit

Intensitas pertemuan komite audit diukur melalui jumlah total rapat yang dilakukan anggota komite audit selama periode akuntansi. Jumlah rapat komite audit didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

g. Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit diukur melalui jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan dilihat dari latar belakang pendidikannya. Jumlah komite audit yang ahli didapat dengan cara melihat laporan tahunan (*annual report*) perusahaan.

### 3.2.3 Variabel Kontrol

Variabel-variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, *leverage*, *return of assets*, rasio persediaan dan piutang atas aktiva perusahaan, *current ratio*, dan Kantor Akuntan Publik yang digunakan.

a. Ukuran Perusahaan

Variabel indikator untuk mewakili faktor ukuran perusahaan adalah total aset yang dimiliki oleh perusahaan (Hay *et al.*, 2008 dalam Widiyanti, 2009). Variabel ini akan diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total aset perusahaan.

b. Jumlah Anak Perusahaan

Variabel akan diukur dengan menggunakan jumlah total anak perusahaan. Jumlah anak perusahaan didapat dengan cara melihat laporan keuangan perusahaan.

c. *Leverage*

Rumus :

$$LEV = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Pengertian :

- 1) utang jangka panjang merupakan utang jangka panjang perusahaan yang dapat dilunasi beberapa waktu (tahun) lagi.
- 2) total asset merupakan total seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud.

d. *Return of Assets*

Rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Pendapatan Operasional setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Pengertian :

- 1) pendapatan merupakan laba usaha perusahaan yang diperoleh dari transaksi utama perusahaan.
- 2) total asset merupakan total seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud.

e. Rasio Persediaan dan Piutang atas Aset Perusahaan

Rumus :

$$\text{INV} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

$$\text{REC} = \frac{\text{Piutang}}{\text{Total Aset}}$$

Pengertian :

- 1) persediaan merupakan seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh perusahaan.
- 2) piutang merupakan seluruh piutang yang dimiliki perusahaan.
- 3) total asset merupakan total seluruh asset yang dimiliki oleh perusahaan, baik aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud.

f. Kantor Akuntan Publik

Variabel ini menggunakan skala nominal, yaitu angka 1 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik *Big 4* serta angka 0 untuk mengindikasikan penggunaan Kantor Akuntan Publik selain *Big 4*. Penggunaan Kantor Akuntan Publik didapat dengan cara melihat laporan audit perusahaan.

### 3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Pemilihan sampel dilakukan secara *purposive* dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis.

Adapun kriteria-kriteria yang dipilih dalam penentuan sampel adalah:

1. perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI selama tahun penelitian yaitu tahun 2008-2010,
2. menyampaikan laporan keuangan dan *annual report* berturut-turut selama tahun 2008-2010 yang dipublikasikan,
3. perusahaan mengalami profit (laba),
4. menyampaikan akun *profesional fee* secara berturut-turut tahun 2008-2010.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian jenis data yang diperlukan adalah jenis data sekunder, dimana data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi

yang bukan pengolahnya. Peneliti memperoleh data *annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI melalui *www.idx.co.id* tahun 2008 - 2010 dan Pojok BEI Universitas Diponegoro.

### 3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel independen dan variabel dependen baik secara partial.

Sebelum melakukan uji regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2006). Tujuan pemenuhan asumsi klasik dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias.

#### 3.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dan menggunakan teknik estimasi OLS (*Ordinary Least Squares*) dengan alasan bahwa variabel independennya lebih dari satu. Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramal bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik-turunkan nilainya (Sugiono, 2000 dalam Martina, 2009). Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Dalam penelitian ini analisis regresi yang digunakan dapat dilihat dengan model regresi sebagai berikut:

$$LNFEF = \beta_0 + \beta_1(ASSET) + \beta_2(SUB) + \beta_3(LEV) + \beta_4(ROA) + \beta_5(INV) + \beta_6(REC) + \beta_7(KAP) + \beta_8(BOARDIND) + \beta_9(BOARDSIZE) +$$

$$\beta_{10}(BOARDMEET_t) + \beta_{11}(ACIND) + \beta_{12}(ACSIZE) + \beta_{13}(ACMEET) + \beta_{14}(ACEXPERTISE) + e$$

dimana :

*LNFEET* = logaritma natural dari *fee* audit

*ASSET* = logaritma natural dari total aktiva

*SUB* = akar pangkat dua dari jumlah anak perusahaan

*LEV* = *leverage*

*ROA* = *return of asset*

*INV* = rasio persediaan terhadap total aset

*REC* = rasio piutang atas aktiva perusahaan

*KAP* = auditor *Big 4*

*BOARDIND* = jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris

*BOARDSIZE* = jumlah anggota dewan komisaris

*BOARDMEET* = jumlah rapat yang diadakan dewan komisaris per tahun buku

*ACIND* = jumlah komisaris independen dalam komite audit

*ACSIZE* = jumlah anggota komite audit

*ACMEET* = jumlah rapat yang diadakan komite audit per tahun buku

*ACEXPERTISE* = jumlah anggota komite audit yang ahli akuntansi dan keuangan

$\beta$  = Koefisien variable bebas

*e* = Kesalahan acak

### 3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui kondisi data yang akan dianalisis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh model analisis yang tepat untuk digunakan dalam penelitian sesuai dengan hipotesisnya. Adapun yang termasuk uji ini antara lain :

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2005). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (nilai korelasinya sama dengan nol). Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama denga nilai VIF tinggi.

Persamaan yang digunakan adalah :

$$VIF = \frac{1}{Tolerance}$$

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolorieritas jika :

- 1) mempunyai nilai *tolerance* < 0,10 atau
- 2) mempunyai nilai VIF > 10.

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui dalam model regresi linier terdapat antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya) pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin Watson* (DW), yaitu dengan menghitung nilai di statistik (Ghozali, 2005). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena

observasi yang berurutan sepanjang waktu (*time series*) yang berkaitan satu sama lainnya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai DW dalam tabel tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilannya adalah sebagai berikut :

- 1) jika  $0 < dw < dl$ , maka terjadi autokorelasi positif
- 2) jika  $dl \leq dw \leq du$ , maka ragu-ragu terjadi autokorelasi
- 3) jika  $du < dw < 4-du$ , maka tidak terjadi autokorelasi
- 4) jika  $4 - du \leq dw \leq 4 - dl$ , maka ragu-ragu terjadi autokorelasi
- 5) jika  $dw > 4 - dl$ , maka terjadi autokorelasi

Keterangan :

$dl$  = batas bawah  $dw$

$du$  = batas atas  $dw$

#### c. Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila dalam grafik tersebut dihasilkan pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola teratur (bergelombang, melebar, atau menyempit) maka ini mengindikasikan bahwa data yang akan dianalisis terjadi heterokedastisitas, tetapi jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik yang menyebar di atas atau di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2005).

#### d. Uji Normalitas Data



Dalam penelitian ini data residual akan diuji dengan uji normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan memperhatikan penyebaran data (titik) pada *normal p-plot of regression standardized residual* dari variabel dependen, dimana :

- 1) jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.5.3 Uji Kebaikan Model

Ketepatan fungsi regresi sample dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fitnya*. Tujuan dari uji kebaikan model ini adalah untuk menentukan seberapa baik model yang digunakan cocok untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik F (Ghozali, 2005).

#### a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis regresi sampel mencocokkan data. Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh regresi. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 sampai 1, apabila  $R^2=0$  berarti tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan jika  $R^2=1$  berarti suatu hubungan yang sempurna.

Untuk regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 maka digunakan *adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinasi. Setiap tambahan satu variabel independen, maka  $R^2$  pasti meningkat tidak peduli apakah variable tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti  $R^2$ , nilai *adjusted* dapat naik atau turun

apabila satu variable independen ditambahkan ke dalam model. Secara matematis jika  $R^2=1$ , maka  $adjusted\ R^2=R^2=1$  sedangkan jika nilai  $R^2=0$ , maka nilai  $adjusted\ R^2=(1-k)/(n-k)$ . Jika  $k>1$ , maka  $adjusted\ R^2$  akan bernilai negatif (Ghozali, 2005).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F ini dilakukan untuk menguji variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Dalam penelitian ini, apakah variabel *LNASSETS*, *SUBS*, *LEV*, *ROA*, *INV*, *REC*, *BIG4*, *BoardInd*, *BoardSize*, *BoardMeet*, *ACInd*, *ACSize*, *ACMeet*, dan *ACExpertise* secara simultan berpengaruh terhadap *fee* audit (*LNFEET*). Rumusan hipotesis statistik pada pengujian ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1=\beta_2=\dots=\beta_{14}=0$ , artinya, semua variabel yang terdiri dari *ASSET*, *SUB*, *LEV*, *ROA*, *INV*, *REC*, *KAP*, *BOARDIND*, *BOARDSIZE*, *BOARDMEET*, *ACIND*, *ACSIZE*, *ACMEET*, dan *ACEXPERTISE* tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (*LNFEET*).

$H_a : \beta_1\neq\beta_2\neq\dots\neq\beta_{14}\neq 0$ , artinya, semua variabel independen yang terdiri dari *ASSET*, *SUB*, *LEV*, *ROA*, *INV*, *REC*, *KAP*, *BOARDIND*, *BOARDSIZE*, *BOARDMEET*, *ACIND*, *ACSIZE*, *ACMEET*, dan *ACEXPERTISE* secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (*LNFEET*).

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ) atau tingkat kepercayaan 95%. Angka 0.05 menjelaskan bahwa 95 % (berasal dari 100 % - 5 %) hasil yang didapat probabilitasnya tepat (Ghozali, 2005). Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari atau sama dengan 0,05 maka hipotesis alternatif diterima yang berarti secara bersama-sama variabel *ASSET*, *SUB*, *LEV*, *ROA*, *INV*, *REC*, *KAP*, *BOARDIND*, *BOARDSIZE*, *BOARDMEET*, *ACIND*, *ACSIZE*, *ACMEET*, dan *ACEXPERTISE* berpengaruh terhadap *fee* audit (*LNFEET*).
- 2) jika nilai probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima yang berarti secara bersama-sama variabel *ASSET*, *SUB*,

*LEV, ROA, INV, REC, KAP, BOARDIND, BOARDSIZE, BOARDMEET, ACIND, ACSIZE, ACMEET, dan ACEXPERTISE* tidak berpengaruh terhadap *fee* audit (*LNFEET*).

#### 3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji setiap hipotesis yang ada dengan menggunakan uji statistik yang tepat. Pengujian yang tepat untuk penelitian ini adalah uji statistik t. hasil pengujian tersebut akan menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak.

##### a. Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui kemampuan masing-masing variabel independen secara individu (*partial*) dalam menjelaskan variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t bertujuan untuk membuktikan apakah variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel terikatnya (Ghozali, 2005). Rumusan hipotesis statistik pada pengujian ini adalah sebagai berikut :

1) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel independensi dewan komisaris (*BOARDIND*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(1)} : \beta_1=0$ , artinya *BOARDIND* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(1)} : \beta_1>0$ , artinya *BOARDIND* berpengaruh negatif terhadap *LNFEET*

2) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel jumlah dewan komisaris (*BOARDSIZE*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(2)} : \beta_2=0$ , artinya *BOARDSIZE* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(2)} : \beta_2>0$ , artinya *BOARDSIZE* berpengaruh positif terhadap *LNFEET*

3) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel intensitas pertemuan dewan komisaris (*BOARDMEET*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(3)} : \beta_3=0$ , artinya *BOARDMEET* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(3)} : \beta_3>0$ , artinya *BOARDMEET* berpengaruh negatif terhadap *LNFEET*

4) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel independensi komite audit (*ACIND*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(4)} : \beta_4=0$ , artinya *ACIND* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(4)} : \beta_4>0$ , artinya *ACIND* berpengaruh negatif terhadap *LNFEET*

5) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel jumlah komite audit (*ACSIZE*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(5)} : \beta_5=0$ , artinya *ACSIZE* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(5)} : \beta_5>0$ , artinya *ACSIZE* berpengaruh negatif terhadap *LNFEET*

6) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel intensitas pertemuan komite audit (*ACMEET*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(6)} : \beta_6=0$ , artinya *ACMEET* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(6)} : \beta_6>0$ , artinya *ACMEET* berpengaruh negatif terhadap *LNFEET*

7) rumusan hipotesis nihil dan alternatif untuk variabel keahlian komite audit (*ACEXPRTISE*) terhadap *fee* audit (*LNFEET*)

$H_{o(7)} : \beta_7=0$ , artinya *ACEXPRTISE* tidak berpengaruh terhadap *LNFEET*

$H_{a(7)} : \beta_7>0$ , artinya *ACEXPRTISE* berpengaruh negatif terhadap *LNFEET*

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ), dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) apabila taraf signifikan observasi kurang dari 0,05 maka hipotesis alternatif dapat diterima, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) apabila taraf signifikan observasi lebih dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

## BAB IV

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik struktur *corporate governance* terhadap *fee* audit.

Pemilihan sampel menggunakan metode *purposing sampling*, yaitu pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan keputusan subjektif peneliti yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 21 perusahaan, sehingga observasi secara keseluruhan sejak tahun 2008-2010 diperoleh sebanyak 63 perusahaan sampel.

Tabel 4.1  
Metode Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi	Seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI
Perusahaan manufaktur yang berturut-turut terdaftar di BEI selama tahun penelitian yaitu tahun 2008-2010	193
Perusahaan menyampaikan laporan keuangan dan <i>annual report</i> berturut-turut selama tahun 2008-2010 yang dipublikasikan	71
Perusahaan mengalami profit (laba) berturut-turut selama tahun 2008-2010	40
Perusahaan menyampaikan akun <i>professional fee</i> secara berturut-turut tahun 2008-2010	21
Jumlah Sampel	21

Adapun daftar nama-nama perusahaan yang menjadi sampel dapat dilihat pada lampiran 1. Dari lampiran 1 dapat diketahui bahwa jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan.

### 4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum

(Ghozali, 2006). Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan variabel-variabel penelitian yaitu *fee* audit, independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, intensitas pertemuan dewan komisaris, independensi komite audit, ukuran komite audit, intensitas pertemuan komite audit, keahlian komite audit, ukuran perusahaan, jumlah anak perusahaan, *leverage*, ROA, rasio persediaan atas total aset, rasio piutang atas total aset, dan Kantor Akuntan Publik.

a. *Fee* Audit

Tabel 4.2  
Statistik Deskriptif *Fee* Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LNFEED	63	7.80	10.70	9.5159	.62841
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel *fee* audit, nilai terendah (*minimum*) sebesar 7,80 yaitu terdapat pada perusahaan PT KABELINDO MURNI Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 10,70 yang terdapat pada perusahaan PT UNITED TRACTORS Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 9,5159 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,62841. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel *fee* audit yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data *fee* audit penyebarannya normal.

b. Independensi Dewan Komisaris

Tabel 4.3

## Statistik Deskriptif Independensi Dewan Komisaris

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOARDIND	63	.00	3.00	1.7778	1.08426
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel independensi dewan komisaris, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT KABELINDO MURNI Tbk, PT KALBE FARMA Tbk, PT TRIAS SENTOSA Tbk, dan PT TIRA AUSTENITE Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 3 yang terdapat pada perusahaan PT ASTRA GRAPHIA Tbk, PT HOLCIM INDONESIA Tbk, PT INDOCEMENT Tbk, PT KIMIA FARMA Tbk, PT MERCK Tbk, PT Selamat Sempurna Tbk, PT UNITED TRACTORS Tbk, PT ARWANA CITRAMULIA Tbk, dan PT ASTRA OTOPARTS Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 1,7778 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,08426. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel independensi dewan komisaris yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data independensi dewan komisaris penyebarannya normal.

### c. Jumlah Dewan Komisaris

Tabel 4.4  
Statistik Deskriptif Jumlah Dewan Komisaris

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOARDSIZE	63	2.00	9.00	4.4286	2.13809
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel jumlah dewan komisaris, nilai terendah (*minimum*) sebesar 2 yaitu

terdapat pada perusahaan PT ARWANA CITRAMULIA Tbk, PT MERCK Tbk, PT SEMEN GRESIK (Persero) Tbk, PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, PT ASTRA OTOPARTS Tbk, dan PT KALBE FARMA Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 9 yang terdapat pada perusahaan PT ASTRA OTOPARTS Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,4286 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,13809. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel jumlah dewan komisaris yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data jumlah dewan komisaris penyebarannya normal.

d. Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris

Tabel 4.5  
Statistik Deskriptif Intensitas Pertemuan Dewan Komisaris

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BOARDMEET	63	.00	15.00	4.8730	2.72676
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel intensitas pertemuan dewan komisaris, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk dan PT MERCK Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 15 yang terdapat pada perusahaan PT MERCK Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 4,8730 dengan nilai standar deviasi sebesar 2,72676. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel intensitas pertemuan dewan komisaris yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data intensitas pertemuan dewan komisaris penyebarannya normal.

e. Independensi Komite Audit

Tabel 4.6



## Statistik Deskriptif Independensi Komite Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACIND	63	.00	2.00	.8413	.48214
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel independensi dewan komisaris, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT HOLCIM INDONESIA Tbk, PT KIMIA FARMA Tbk, PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, PT TIRA AUSTENITE Tbk, PT TRIAS SENTOSA Tbk, dan PT AKR CORPORINDO Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 2 yang terdapat pada perusahaan PT UNITED TRACTORS Tbk, PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, dan PT DYNAPLAST Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,8413 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,48214. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel independensi dewan komisaris yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data independensi dewan komisaris penyebarannya normal.

### f. Jumlah Komite Audit

Tabel 4.7  
Statistik Deskriptif Jumlah Komite Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACSIZE	63	.00	5.00	2.9206	.86699
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel jumlah komite audit, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat

pada perusahaan PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 5 yang terdapat pada perusahaan PT Selamat Sempurna Tbk, dan PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,9206 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,86699. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel jumlah komite audit yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data jumlah komite audit penyebarannya normal.

g. Intensitas Pertemuan Komite Audit

Tabel 4.8  
Statistik Deskriptif Intensitas Pertemuan Komite Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACMEET	63	.00	18.00	7.3016	3.79148
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel intensitas pertemuan komite audit, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, dan PT TRIAS SENTOSA Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 18 yang terdapat pada perusahaan PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 7,3016 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,79148. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel intensitas pertemuan komite audit yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data intensitas pertemuan komite audit penyebarannya normal.

h. Keahlian Komite Audit

Tabel 4.9  
Statistik Deskriptif Keahlian Komite Audit

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ACEXPERTISE	63	.00	4.00	2.2222	1.00714
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel keahlian komite audit, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT MERCK Tbk, PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, dan PT ASTRA OTOPARTS Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 4 yang terdapat pada perusahaan PT METRODATA ELECTRONICS Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2,2222 dengan nilai standar deviasi sebesar 1,00714. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel keahlian komite audit yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data keahlian komite audit penyebarannya normal.

i. Ukuran Perusahaan

Tabel 4.10  
Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ASSET	63	11.00	13.00	12.2698	.65270
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel ukuran perusahaan, nilai terendah (*minimum*) sebesar 11 yaitu terdapat

pada perusahaan PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk, PT TIRA AUSTENITE Tbk, PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk, dan PT UNITED TRACTORS Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 13 yang terdapat pada perusahaan PT UNITED TRACTORS Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 12,2698 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,65270. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel ukuran perusahaan yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data ukuran perusahaan penyebarannya normal.

j. Jumlah Anak Perusahaan

Tabel 4.11  
Statistik Deskriptif Jumlah Anak Perusahaan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SUB	63	.00	22.00	5.5238	5.34867
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel jumlah anak perusahaan, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT ASTRA GRAPHIA Tbk, PT METRODATA ELECTRONICS Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 22 yang terdapat pada perusahaan PT KALBE FARMA Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 5,5238 dengan nilai standar deviasi sebesar 5,34867. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel jumlah anak perusahaan yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data jumlah anak perusahaan penyebarannya normal.

k. *Leverage*

Tabel 4.12  
 Statistik Deskriptif Jumlah Anak Perusahaan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEV	63	.06	.76	.4530	.17019
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel *leverage*, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,06 yaitu terdapat pada perusahaan PT TRIAS SENTOSA Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,76 yang terdapat pada perusahaan PT FAJAR SURYA WISESA Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,4530 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,17019. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel *leverage* yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data *leverage* penyebarannya normal.

1. ROA

Tabel 4.13  
 Statistik Deskriptif ROA

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA	63	.01	.70	.1082	.10469
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel ROA, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,01 yaitu terdapat pada perusahaan PT KABELINDO MURNI Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*)

sebesar 0,70 yang terdapat pada perusahaan PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1082 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,10469. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel ROA yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data ROA penyebarannya normal.

m. Rasio Persediaan atas Total Asset

Tabel 4.14  
Statistik Deskriptif Rasio Persediaan atas Total Asset

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
INV	63	.00	.37	.1755	.08622
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel rasio persediaan atas total aset, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu terdapat pada perusahaan PT AKR CORPORINDO Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,37 yang terdapat pada perusahaan PT TIRA AUSTENITE Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1755 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,08622. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel rasio persediaan atas total aset yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data rasio persediaan atas total aset penyebarannya normal.

n. Rasio Piutang atas Total Asset

Tabel 4.15

### Statistik Deskriptif Rasio Piutang atas Total Aset

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
REC	63	.06	.41	.1979	.07623
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel rasio piutang atas total aset, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,06 yaitu terdapat pada perusahaan PT HOLCIM INDONESIA Tbk, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 0,41 yang terdapat pada perusahaan PT MERCK Tbk. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1979 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,07623. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-rata pada variabel rasio piutang atas total aset yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data rasio piutang atas total aset penyebarannya normal.

o. Kantor Akuntan Publik

Tabel 4.16  
Statistik Deskriptif Kantor Akuntan Publik

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KAP	63	.00	1.00	.6825	.46923
Valid N (listwise)	63				

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa dari 63 sampel penelitian tersebut pada variabel KAP, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0 yaitu, sedangkan nilai tertinggi (*maximum*) sebesar 1. Nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,6825 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,46923. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih

kecil dari nilai rata-rata pada variabel KAP yang berarti bahwa penyimpangan data yang terjadi rendah, dengan demikian data KAP penyebarannya normal.

### 4.3 Analisis dan Pembahasan

#### 4.3.1 Model Regresi

Tabel 4.17  
Analisis Model Regresi

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.888	1.370	6.489	.000
	BOARDIND	.159	.062	.274	.2576
	BOARDSIZE	.052	.031	.176	1.661
	BOARDMEET	-.007	.027	-.031	-.268
	ACIND	.094	.133	.072	.707
	ACSIZE	-.073	.090	-.101	-.812
	ACMEET	.076	.020	.459	3.839
	ACEXPERTISE	-.181	.077	-.291	-2.360
	ASSET	-.010	.110	-.010	-.088
	SUB	.014	.013	.119	1.044
	LEV	-.028	.439	-.008	-.064
	ROA	.263	.892	.044	.295
	INV	-.225	.839	-.031	-.268
	REC	.313	1.192	.038	.263
	KAP	.202	.150	.151	1.341

a. Dependent Variable: LNFEET

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012



Tabel 4.17 di atas menunjukkan koefisien untuk masing-masing variabel independen dapat dituliskan persamaan matematis sebagai berikut :

$$\begin{aligned} LNFEES &= 8,888 - 0,010(ASSETS) + 0,014(SUBS) - 0,028(LEV) + 0,263(ROA) \\ &- 0,225(INV) + 0,313(REC) + 0,202(KAP) + 0,159(BoardInd) \\ &+ 0,052(BoardSize) - 0,007(BoardMeet) + 0,094(ACInd) \\ &- 0,073(ACSize) + 0,076(ACMeet) - 0,181(ACExpertise) + e \end{aligned}$$

keterangan :

1. Konstanta sebesar 8,888 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan maka *fee* audit diprediksi naik sebesar 8,888 satuan
2. Koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar  $- 0,010$  menyatakan bahwa apabila ukuran perusahaan naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan turun 0,010 satuan
3. Koefisien regresi jumlah anak perusahaan sebesar 0,014 menyatakan bahwa apabila jumlah anak perusahaan naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,014 satuan
4. Koefisien regresi *leverage* sebesar  $- 0,028$  menyatakan bahwa apabila *leverage* naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan turun 0,028 satuan
5. Koefisien regresi ROA sebesar 0,263 menyatakan bahwa apabila ROA naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,263 satuan
6. Koefisien regresi rasio persediaan atas total aset sebesar  $- 0,225$  menyatakan bahwa apabila rasio persediaan atas total aset naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan turun 0,225 satuan
7. Koefisien regresi rasio total piutang atas total aset sebesar 0,313 menyatakan bahwa apabila rasio total piutang atas total aset naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,313 satuan
8. Koefisien regresi KAP sebesar 0,202 menyatakan bahwa apabila KAP naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,202 satuan

9. Koefisien regresi independensi dewan komisaris sebesar 0,159 menyatakan bahwa apabila independensi dewan komisaris naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,159 satuan
10. Koefisien regresi jumlah dewan komisaris sebesar 0,052 menyatakan bahwa apabila jumlah dewan komisaris naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,052 satuan
11. Koefisien regresi intensitas pertemuan dewan komisaris sebesar  $- 0,007$  menyatakan bahwa apabila intensitas pertemuan dewan komisaris naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan turun 0,007 satuan
12. Koefisien regresi independensi komite audit sebesar 0,094 menyatakan bahwa apabila independensi komite audit naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,094 satuan
13. Koefisien regresi jumlah komite audit sebesar  $- 0,073$  menyatakan bahwa apabila jumlah komite audit naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan turun 0,073 satuan
14. Koefisien regresi intensitas pertemuan komite audit sebesar 0,076 menyatakan bahwa apabila intensitas pertemuan komite audit naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan naik 0,076 satuan
15. Koefisien regresi keahlian komite audit sebesar  $- 0,181$  menyatakan bahwa apabila rasio keahlian komite audit naik sedangkan variabel lain konstan maka *fee* audit diprediksi akan turun 0,181 satuan

### 4.3.3 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.18  
Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.888	1.370		6.489	.000		
BOARDIND	.159	.062	.274	2.576	.013	.724	1.381
BOARDSIZE	.052	.031	.176	1.661	.103	.728	1.374
BOARDMEET	-.007	.027	-.031	-.268	.790	.606	1.651
ACIND	.094	.133	.072	.707	.483	.783	1.277
ACSIZE	-.073	.090	-.101	-.812	.421	.529	1.891
ACMEET	.076	.020	.459	3.839	.000	.572	1.749
ACEXPERTISE	-.181	.077	-.291	-2.360	.022	.538	1.858
ASSET	-.010	.110	-.010	-.088	.930	.624	1.603
SUB	.014	.013	.119	1.044	.302	.625	1.599
LEV	-.028	.439	-.008	-.064	.949	.578	1.730
ROA	.263	.892	.044	.295	.769	.370	2.700
INV	-.225	.839	-.031	-.268	.790	.616	1.622
REC	.313	1.192	.038	.263	.794	.391	2.557
KAP	.202	.150	.151	1.341	.186	.648	1.543

a. Dependent Variable: LNFEE

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel di atas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai tolerance  $> 0,1$  dan nilai VIF  $< 10$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi ini.

b. Uji Autokorelasi

Tabel 4.19  
Uji Autokorelasi

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.780 <sup>a</sup>	.608	.493	.44737	2.344

a. Predictors: (Constant), KAP, BOARDSIZE, ACIND, ACMEET, BOARDMEET, INV, ACSIZE, LEV, SUB, REC, ACEXPERTISE, ROA, ASSET, BOARDIND

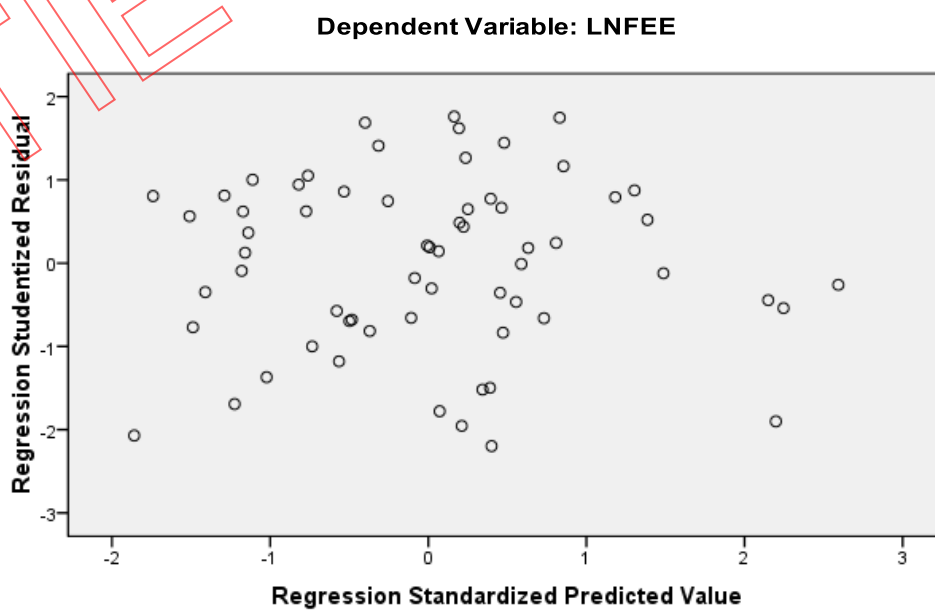
b. Dependent Variable: LNFEE

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel di atas didapatkan hasil  $dw=2,344$  dengan  $k=14$ ,  $n=63$  sehingga berdasarkan nilai tabel diperoleh  $dl=1,1022$  dan  $du=2,1525$ . Oleh karena itu nilai  $(4-du)=(4-2,1525) < dw=2,344 > du=2,1525$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

c. Heterokedastisitas

Gambar 4.1  
Scatterplot



Grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini. Selain dengan mengamati grafik *scatterplot*, uji heteroskedastisitas juga dapat dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser yaitu pengujian dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen.

Output dari proses di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20  
Uji Glejser

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.621	.640		.970	.337
BOARDIND	-.051	.029	-.259	-1.786	.080
BOARDSIZE	.019	.015	.184	1.273	.209
BOARDMEET	.005	.013	.065	.410	.683
ACIND	-.070	.062	-.157	-1.126	.266
ACSIZE	.011	.042	.044	.259	.797
ACMEET	.010	.009	.168	1.029	.308
ACEXPERTISE	.049	.036	.227	1.352	.183
ASSET	-.048	.051	-.146	-.933	.356
SUB	-.002	.006	-.055	-.350	.728
LEV	.159	.205	.126	.775	.442
ROA	.490	.417	.238	1.175	.246
INV	-.532	.392	-.213	-1.357	.181
REC	.365	.557	.129	.655	.515
KAP	.056	.070	.121	.790	.433

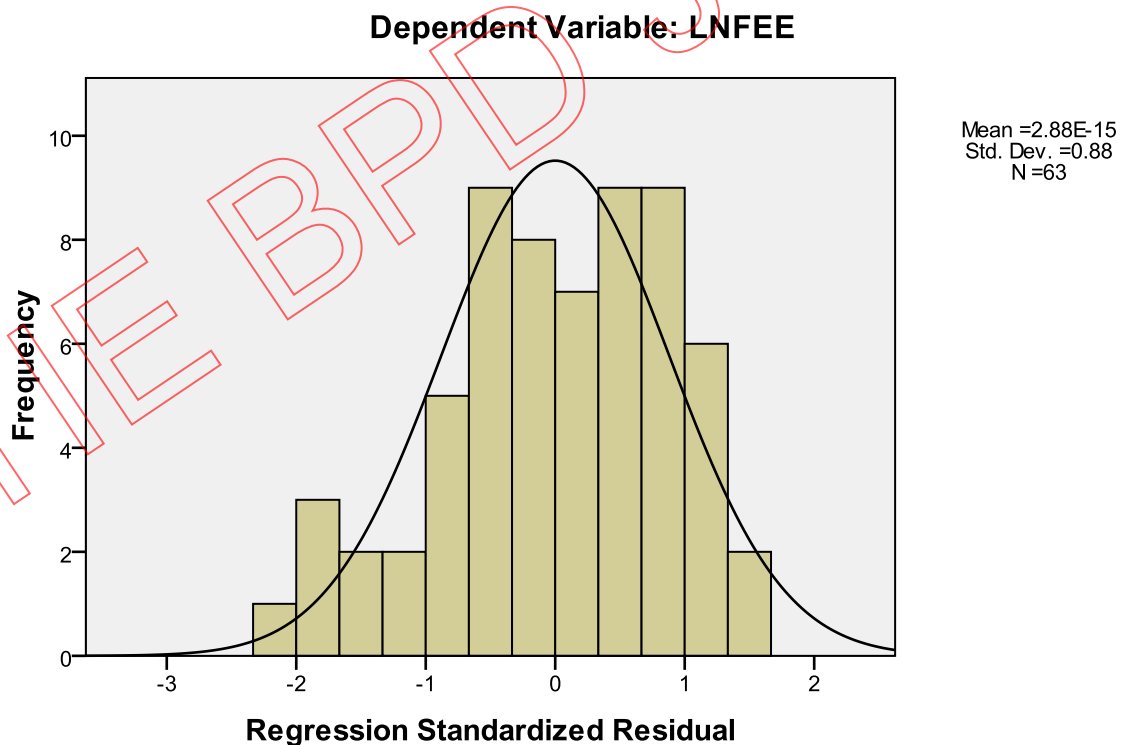
a. Dependent Variable: Abs\_res

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan semua variabel independen mempunyai nilai sig  $\geq 0,05$ . Jadi tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen abs\_res. Hal ini terlihat dari nilai sig pada tiap-tiap variabel independen seluruhnya diatas 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

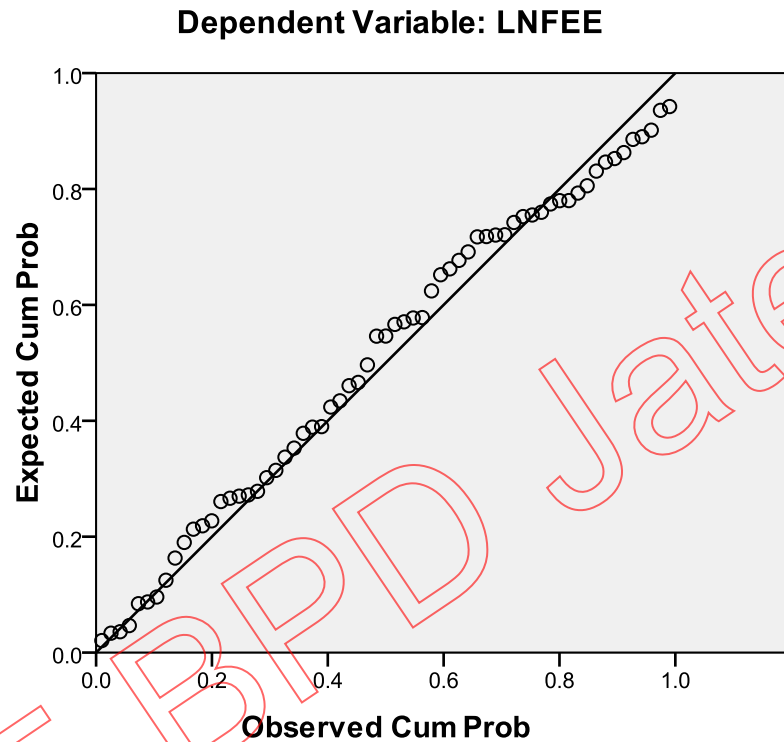
d. Uji Normalitas Data

Gambar 4.2  
Histogram



Gambar 4.3

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



Dengan melihat grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal, sedangkan pada grafik normal plot terlihat data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal maka variabel dependen Y memenuhi asumsi normalitas.

Hasil output dari pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.39362890
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.042
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.734
Asymp. Sig. (2-tailed)		.653

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Analisis data hasil Output :

a. Uji normalitas data digunakan hipotesis sebagai berikut :

$H_0$  : Data berdistribusi normal

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal

b. Kriteria penerimaan  $H_0$

$H_0$  diterima jika nilai sig (2-tailed) > 5%.

Dari tabel diperoleh nilai sig = 0,653 = 65.3% > 5% , maka  $H_0$  diterima.

Artinya variabel dependen berdistribusi normal.

#### 4.3.3 Analisis Kebaikan Model

a. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)



Untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel model summary di bawah ini.

Tabel 4.22

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 <sup>a</sup>	.608	.493	.44737

a. Predictors: (Constant), KAP, REC, ACEXPERTISE, ACIND, BOARDMEET, ASSET, BOARDIND, BOARDSIZE, LEV, SUB, ACMEET, INV, ACSIZE, ROA

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel di atas diperoleh nilai *Adjusted R*<sup>2</sup> = 0,493 = 49.3% ini berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen sebesar 49.3% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Untuk melakukan uji F dapat dilihat pada tabel anova dibawah ini.

Tabel 4.23

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.878	14	1.063	5.310	.000 <sup>a</sup>
	Residual	9.607	48	.200		
	Total	24.484	62			

a. Predictors: (Constant), KAP, REC, ACEXPERTISE, ACIND, BOARDMEET, ASSET, BOARDIND, BOARDSIZE, LEV, SUB, ACMEET, INV, ACSIZE, ROA

b. Dependent Variable: LNFEED

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel Anova tersebut menunjukkan nilai F hitung = 5,310 dengan probabilitas 0,0000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka model

regresi dapat digunakan untuk memprediksi *fee* audit atau dapat dikatakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap *fee* audit

#### 4.3.3 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah secara individu (parsial) variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hasil output dari SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.24

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	8.888	1.370		6.489	.000
	BOARDIND	.159	.062	.274	2.576	.013
	BOARDSIZE	.052	.031	.176	1.661	.103
	BOARDMEET	-.007	.027	-.031	-.268	.790
	ACIND	.094	.133	.072	.707	.483
	ACSIZE	-.073	.090	-.101	-.812	.421
	ACMEET	.076	.020	.459	3.839	.000
	ACEXPERTISE	-.181	.077	-.291	-2.360	.022
	ASSET	-.010	.110	-.010	-.088	.930
	SUB	.014	.013	.119	1.044	.302
	LEV	-.028	.439	-.008	-.064	.949
	ROA	.263	.892	.044	.295	.769
	INV	-.225	.839	-.031	-.268	.790
	REC	.313	1.192	.038	.263	.794
	KAP	.202	.150	.151	1.341	.186

a. Dependent Variable: LN<sub>FEE</sub>

Sumber: Data sekunder yang telah diolah, 2012

Tabel 4.24 menunjukkan bahwa terdapat tiga variabel yaitu variabel *BOARDIND*, *ACMEET*, dan *ACEXPERTISE* yang memiliki tingkat signifikansi di

bawah 0,05. Variabel *BOARDIND* memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,013 dengan nilai t hitung 2,576. Variabel *ACMEET* memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,000 dengan nilai t hitung sebesar 3,839. Variabel *ACEXPERTISE* memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,022 dengan nilai t hitung sebesar - 2,360. Sedangkan variabel lainnya memiliki tingkat signifikansi diatas 0,05.

Hasil pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>1</sub> = Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *BOARDIND* mempunyai nilai beta sebesar 0,159 dan probabilitas signifikan 0,013. Oleh karena *p-value* < 0,05, maka mampu menerima H<sub>a</sub> dan menolak H<sub>o</sub>. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *BOARDIND* terbukti mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari independensi dewan komisaris terhadap *fee* audit. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Koefisien arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi independensi dewan komisaris, maka semakin tinggi *fee* audit yang diterima auditor eksternal.

Hasil penelitian ini mendukung perspektif berbasis permintaan yang membuktikan bahwa dewan komisaris yang lebih independen akan menuntut kualitas yang lebih tinggi dari auditor eksternal, sehingga menyebabkan biaya audit yang lebih tinggi. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tanggung jawab komisaris independen melakukan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengembangan kontrol dalam perusahaan sebagai pertanggung jawaban kepada para *stakeholders* serta untuk melindungi reputasi pribadi mereka. Sehingga komisaris independen akan meningkatkan permintaan terhadap audit eksternal yang lebih baik. Dengan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa struktur *governance* yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal yang akan berpengaruh terhadap peningkatan *fee* audit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Carcello *et al.* (2002), Abbott *et al.* (2003), dan Goodwin-Stewart *et al.* (2006),

yang menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Beasley *et al.* (2000) dalam Yatim *et al.* (2006) bahwa dewan komisaris yang lebih independen akan menurunkan risiko yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Hal ini akan mengurangi penaksiran risiko yang dilakukan oleh auditor sehingga akan mengurangi *fee* audit.

### **H<sub>2</sub> = Jumlah dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *fee* audit**

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *BOARDSIZE* mempunyai nilai beta sebesar 0,052 dan probabilitas signifikan 0,103. Oleh karena *p-value* > 0,05, maka mampu menerima H<sub>0</sub> dan menolak H<sub>a</sub>. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *BOARDSIZE* terbukti tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya (Rizqiasih, 2010).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Carcello *et al.* (2002) bahwa jumlah dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap *fee* audit. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Yatim *et al.* (2006) yang menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris akan menentukan dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan. Hal ini menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan sehingga akan berakibat besarnya *fee* audit.

### **H<sub>3</sub> = Intensitas pertemuan dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *BOARDMEET* mempunyai nilai beta sebesar - 0,007 dan probabilitas signifikan 0,790. Oleh karena  $p\text{-value} > 0,05$ , maka mampu menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *BOARDMEET* terbukti tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini disebabkan walaupun dewan komisaris tidak mengikuti rapat dewan komisaris dapat melakukan tugasnya dengan menerima salinan risalah rapat dewan komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat dewan komisaris, sehingga intensitas rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi hasil audit yang berakibat pada menurunnya *fee* audit.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et al.* (2006) bahwa *fee* audit eksternal tidak memiliki pengaruh yang signifikan frekuensi pertemuan dewan komisaris. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Carcello *et al.* (2002) yang menyatakan bahwa dewan komisaris perusahaan yang *diligent* (sering mengadakan rapat) akan lebih peduli dan lebih mendukung fungsi audit eksternal serta akan lebih menginginkan penambahan terhadap lingkup kerja audit yang akan meningkatkan *fee* audit.

#### **$H_4$ = Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *ACIND* mempunyai nilai beta sebesar 0,094 dan probabilitas signifikan 0,483. Oleh karena  $p\text{-value} > 0,05$ , maka mampu menerima  $H_0$  dan menolak  $H_a$ . Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *ACIND* terbukti tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan.

Independensi komite audit diharapkan dapat menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan. Komite audit merupakan organ

pendukung dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan pengganti dari pengawasan yang dilakukan dewan komisaris. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dilakukan secara terpisah saat dewan komisaris tidak dapat melakukan pengawasan maka komite audit yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen, sehingga independensi komite audit tidak mempengaruhi hasil audit yang berpengaruh terhadap *fee* audit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Yatim *et al.* (2006) dan Carcello *et al.* (2002) yang tidak menemukan pengaruh antara independensi komite audit dengan *fee* audit. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Abbott *et al.* (2001) bahwa komite audit yang independen dan aktif menuntut kualitas audit yang lebih tinggi berkaitan dengan perhatian yang besar terhadap kerugian moneter maupun hilangnya nama baik akibat kesalahan dalam pelaporan keuangan, sehingga kualitas audit yang tinggi menuntut *fee* audit yang tinggi pula.

#### **H<sub>5</sub> = Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *ACSIZE* mempunyai nilai beta sebesar - 0,073 dan probabilitas signifikan 0,421. Oleh karena *p-value* > 0,05, maka mampu menerima H<sub>0</sub> dan menolak H<sub>a</sub>. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *ACSIZE* terbukti tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan.

Jumlah anggota komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dikarenakan hampir keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai komite audit. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Edaran BAPEPAM SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek

Jakarta melalui peraturan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk memiliki komite audit.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Hay *et al.* (2008) dalam Widiyanti (2009) yang menemukan bahwa sejak komite audit menjadi persyaratan bagi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di *New Zealand Stock Exchange*, variabel penelitian komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee audit*.

**H<sub>6</sub> = Intensitas pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee audit***

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *ACMEET* mempunyai nilai beta sebesar 0,076 dan probabilitas signifikan 0,000. Oleh karena *p-value* < 0,05, maka mampu menerima H<sub>a</sub> dan menolak H<sub>o</sub>. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *ACMEET* terbukti mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *fee audit* eksternal. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan. Koefisien arah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas pertemuan komite audit, maka semakin tinggi *fee audit* yang diterima auditor eksternal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan perspektif berbasis permintaan yaitu semakin sering komite audit bertemu menuntut peningkatan kualitas audit yang lebih tinggi, dimana perusahaan dengan struktur *governance* yang baik memiliki permintaan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan *fee audit* eksternal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Goodwin-Stewart dan Kent (2006) dan Carcello *et al.* (2002) bahwa pertemuan komite audit berhubungan dengan kenaikan *fee audit*. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Yatim *et al.* (2006) yang konsisten dengan pendekatan berbasis risiko atas jasa audit, maka komite audit yang lebih sering bertemu diharapkan akan

mengurangi masalah pelaporan keuangan yang mengarah kepada *fee* audit eksternal yang lebih rendah.

**H<sub>7</sub> = Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap *fee* audit**

Tabel 4.24 menunjukkan variabel *ACEXPERTISE* mempunyai nilai beta sebesar - 0,181 dan probabilitas signifikan 0,022. Oleh karena *p-value* < 0,05, maka mampu menerima H<sub>a</sub> dan menolak H<sub>o</sub>. Dari hasil pengujian statistik diketahui bahwa variabel *ACEXPERTISE* terbukti mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *fee* audit eksternal. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Koefisien arah negatif mengindikasikan bahwa semakin banyak anggota komite audit yang ahli, maka semakin rendah *fee* audit yang diterima auditor eksternal.

Hasil penelitian ini konsisten dengan perspektif berbasis risiko bahwa keahlian komite audit akan mengurangi penilaian risiko yang terkait dengan proses pelaporan sehingga mengurangi tingkat pengujian audit dan menurunkan *fee* audit. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Johl *et al.* (2009) yang menemukan hubungan negatif antara keahlian komite audit dengan *fee* audit. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Carcello *et al.* (2002), Abbott *et al.* (2003), dan Yatim *et al.* (2006) yang konsisten dengan pendekatan berbasis permintaan, maka komite audit yang lebih ahli diharapkan akan meningkatkan kualitas audit yang berakibat pada meningkatnya *fee* audit



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Independensi dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hasil ini sesuai dengan perpektif berbasis permintaan dimana komisaris independen akan meningkatkan permintaan terhadap kualitas audit eksternal yang lebih baik, dapat dikatakan bahwa struktur *governance* yang kuat akan meningkatkan permintaan terhadap jasa audit eksternal yang akan berpengaruh terhadap peningkatan *fee* audit.
- b. Ukuran dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan pemilihan anggota dewan komisaris yang berdasarkan kedudukan dan kekerabatan menyebabkan mekanisme *check and balance* terhadap direksi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Intensitas pertemuan dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hal ini disebabkan walaupun dewan komisaris tidak mengikuti rapat dewan komisaris dapat melakukan tugasnya dengan menerima salinan risalah rapat dewan komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat dewan komisaris, sehingga intensitas rapat dewan komisaris tidak mempengaruhi hasil audit yang berakibat pada menurunnya *fee* audit.
- d. Independensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *fee* audit. Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit merupakan pengawasan penggati sehingga dilakukan secara terpisah saat dewan komisaris tidak dapat melakukan pengawasan maka komite audit yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap manajemen.

- e. Ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah mempunyai komite audit. Hal ini disebabkan karena adanya regulasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Edaran BAPEPAM SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 serta peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta melalui peraturan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta untuk memiliki komite audit.
- f. Intensitas pertemuan komite audit mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap *fee* audit, sehingga hipotesis tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini konsisten dengan perspektif berbasis permintaan yaitu semakin sering komite audit bertemu menuntut peningkatan kualitas audit yang lebih tinggi, dimana perusahaan dengan struktur *governance* yang baik memiliki permintaan kualitas audit yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan *fee* audit eksternal.
- g. Keahlian komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *fee* audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan perspektif berbasis risiko bahwa keahlian komite audit akan mengurangi penilaian risiko yang terkait dengan proses pelaporan sehingga mengurangi tingkat pengujian audit dan menurunkan *fee* audit.

## 5.2 Keterbatasan

Terdapat beberapa keterbatasan yang teridentifikasi dalam penelitian ini,

yaitu:

- a. Karena keterbatasan data tentang *fee* audit, maka dalam penelitian ini diterapkan penggunaan data *professional fees* untuk memberikan nilai pada variabel *fee* audit
- b. Nilai *Adjusted R Square* hanya sebesar 0.493. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen

sebesar 49,3% sedangkan sisanya sebesar 50,7% (100% - 49,3%) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam penelitian ini.

### 5.3 Saran

Mengacu kepada beberapa keterbatasan yang ada, beberapa saran untuk penelitian mendatang disarankan untuk :

- a. Penelitian mendatang sebaiknya menggunakan perusahaan-perusahaan yang mencantumkan data tentang *fee* audit dari pada data mengenai *professional fees* dalam laporan keuangannya sehingga lebih menggambarkan data *fee* audit,
- b. Penelitian mendatang sebaiknya menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi *fee* audit agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik.

### 5.4 Implikasi Manajerial

Adapun implikasi manajerial yang dapat diterapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dengan penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari menurunnya tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen.
- b. Penerapan *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L.J., S. Parker, G.F. Peters and K. Raghunandan (2003), The Association Between Audit Committee Characteristics and Audit Fees, *Auditing : A Journal of Practice & Theory*, Vol. 22 No. 2, pp. 17-32.
- Adityawati, Patralia (2011), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Publik pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia, *Skripsi- Dipublikasikan*.
- Aryani, Ika Kurnia (2011), Pengaruh Internal Audit terhadap Audit Fee dengan penerapan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening, Universitas Diponegoro, *Skripsi- Dipublikasikan*.
- Boediono, Gideon SB (2005), Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur, *Seminar Nasional Akuntansi 8*.
- Carcello, Joseph V., Dana R. Hermanson, T.I. Neal, and Richard A. Riley (2002), Board Characteristics and Audit Fees, *Contemporary Accounting Research*, Vol. 19 No. 3, pp. 365-384.
- Ettredge, Michael L. , Chan Li, and Susan Scholz (2007), Audit Fees and Auditor Dismissals in the Sarbanes-Oxley Era, *Accounting Horizons*, Vol. 21, No. 4, PP. 371–386.
- Goodwin-Stewart, Jenny and Pamela Kent (2006), Relation Between External Audit Fee Audit Committee Characteristics and Internal Audit, *Journal of Accounting and Finance*, No. 46, h. 387 – 404.
- Ghozali, Imam (2006), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Johl, Shireenjit, [Mazlina Zain](#) and Nava [Subramaniam](#) (2009), The association between corporate governance attributes and audit fees in Malaysia : ethnicity implications, *Accounting and Finance Association of Australia and New Zealand Annual Conference (AFAANZ)*, h. 1-42, Adelaide.
- Lifschutz, Shilo, Arie Jacobi, Beer Sheva, and Shlomit Feldshtein (2007), Corporate Governance Characteristics and External Audit Fees: A Study of

Large Public Companies in Israel, *International Journal of Business and Management*, Vol. 5, No. 3

Linoputri, Ferima Purmateti (2010), Pengaruh Corporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern, Universitas Diponegoro, *Skripsi – Dipublikasikan*

Halim, Yonathan (2005), Peranan Metode Lowballing Cost oleh Kantor Akuntan Publik di Surabaya, *Skripsi – Dipublikasikan*

Harjanti, Mardina Dwi (2011), Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen, Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan, STIE Bank BPD Jateng, *Skripsi – Tidak Dipublikasikan*

Mitra, Santanu, Mahmud Hossain, dan Donald R. Dei (2007), The Empirical Relationship Between Ownership Characteristics and Audit Fees, *Rev Quant Finan Acc*, No. 28, 257–285

PSA No.25, SA Seksi 312 tentang Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit

Pujiastuti, Aprillia (2010), Hubungan Antara Karakteristik Dewan Komisaris dan Komite Audit dengan Working Capital Accrual sebagai Proxy Manajemen Laba, Universitas Diponegoro, *Skripsi - Dipublikasikan*

Rizqiasih, Putri Dyah (2010), Pengaruh Struktur Governance Terhadap Fee Audit Eksternal, Universitas Diponegoro, *Skripsi – Dipublikasikan*

Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Nomor : PER-01/MBU/2011, tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Syakhroza, Akhmad (2004), Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan system Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN, *Pidato Pengukuhan Guru Besar FE UI*, FE UI, Jakarta

Setyaningrum, Dyah (2005), Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Peringkat Surat Utang Perusahaan Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, No.22, 73-102

Setyarini, Yudiati Indah (2011), Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Risiko

Manajemen (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Financial yang terdaftar pada BEI Tahun 2008-2009), Universitas Diponegoro, *Skripsi – Dipublikasikan*

Suharli, Michell dan Nurlaelah (2008), Konsentrasi Auditor dan Penetapan Fee Audit : Investigasi pada BUMN, *JAAI*, Vol. 12, No. 2, 133-148

Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (2008), Nomor : KEP.024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan Fee Audit, Jakarta.

The Blue Ribbon Committee (1999)

Toha, Akhmad (2004), Efektifitas Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol 8. h. 17–41.

Ujiyantho Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka (2007), Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur), *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Widarsono, Agus (2004), Audit Berpeduli Risiko (Risk Based Audit) dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Audit : (Perubahan Paradigma dalam Melakukan Audit dari Pengendalian ke Risiko, Menuju Audit yang Efektif dan Efisien).

Widiasari, Esti, Tri Jatmiko (2008), Pengaruh Pengendalian Internal Perusahaan dan Struktur Corporate Governance Terhadap Fee Audit, Universitas Diponegoro.

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Yatim, Puan., Pamela Kent and Peter Clarkson (2006), Governance Structures, Ethnicity, and Audit Fees of Malaysian Listed Firms, *ePublications@bond*.

# LAMPIRAN

STIE BPD Jateng

**LAMPIRAN 1**

**DAFTAR SAMPEL PENELITIAN**

<b>Nama Perusahaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<i>a. Food and Beverages</i> 1. PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk	1	4,76 %
<i>b. Paper and Allied Products</i> 2. PT FAJAR SURYA WISESA Tbk	1	4,76 %
<i>c. Chemical and Allied Products</i> 3. PT AKR CORPORINDO Tbk	1	4,76 %
<i>d. Plastics and Glass Products</i> 4. PT DYNAPLAST Tbk 5. PT TRIAS SENTOSA Tbk	2	9,52 %
<i>e. Cement</i> 6. PT HOLCIM INDONESIA Tbk 7. PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk 8. PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk	3	14,29 %
<i>f. Metal and Allied Products</i> 9. PT Citra Tubindo Tbk 10. PT TIRA AUSTENITE Tbk	2	9,52 %
<i>g. Stone, Clay, Glass and Concrete Products</i> 11. PT ARWANA CITRAMULIA Tbk	1	4,76 %
<i>h. Cables</i> 12. PT KABELINDO MURNI Tbk	1	4,76 %
<i>i. Elektronik and Office Equipment</i> 13. PT ASTRA GRAPHIA Tbk 14. P.T. METRODATA ELECTRONICS Tbk	2	9,52 %
<i>j. Automotive and Allied Products</i> 15. PT ASTRA OTOPARTS Tbk 16. PT UNITED TRACTORS Tbk 17. PT Selamat Sempurna Tbk	3	14,29 %
<i>k. Photographic Equipment</i> 18. PT MODERN INTERNASIONAL Tbk	1	4,76 %
<i>l. Pharmaceuticals</i> 19. PT KALBE FARMA Tbk 20. PT KIMIA FARMA Tbk 21. PT MERCK Tbk	3	14,29 %
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>100%</b>



## LAMPIRAN 2

## TABULASI DATA PENELITIAN

TAHUN	NO	KODE	LN FEE	BOARD IND	BOARD SIZE	BOARD MEET	AC IND	AC SIZE	AC MEET	AC EXPERIENCE	ASSET	SUB	LEV	ROA	INV	REC	KAP
2008	1	AKRA	9.77	2	3	9	1	3	9	3	13	13	0.599	0.056	0.001	0.189	1
2008	2	ARNA	8.77	2	2	4	1	3	10	3	12	3	0.609	0.075	0.053	0.199	1
2008	3	ASGR	9.56	3	3	4	1	3	10	2	12	0	0.504	0.074	0.200	0.234	1
2008	4	AUTO	9.10	1	9	5	1	3	7	2	13	5	0.301	0.154	0.169	0.151	1
2008	5	CTBN	9.02	1	3	8	1	3	4	2	12	15	0.510	0.105	0.243	0.206	1
2008	6	DYNA	9.39	1	4	4	1	4	4	2	12	5	0.581	0.010	0.130	0.186	1
2008	7	FASW	9.92	1	3	4	1	3	13	3	13	1	0.758	0.012	0.131	0.094	0
2008	8	SMCB	9.81	3	7	4	0	3	10	3	13	3	0.669	0.037	0.050	0.076	0
2008	9	INTP	9.91	3	7	4	1	3	5	3	13	9	0.245	0.155	0.134	0.082	1
2008	10	KBUM	8.80	0	4	4	1	4	4	1	12	1	0.510	0.006	0.097	0.323	1
2008	11	KLBF	8.95	0	6	6	1	4	4	2	13	20	0.238	0.124	0.282	0.176	1
2008	12	KAEP	9.97	3	4	12	0	3	12	1	11	2	0.344	0.038	0.287	0.186	0
2008	13	MERK	9.64	3	3	4	1	2	2	0	12	1	0.127	0.263	0.188	0.240	1
2008	14	MTDL	8.95	2	3	4	1	3	2	4	12	0	0.674	0.023	0.179	0.357	1
2008	15	MDRN	9.49	1	3	4	1	3	4	2	12	4	0.599	0.026	0.330	0.219	1
2008	16	SMSM	8.85	3	8	4	1	5	5	3	12	1	0.367	0.098	0.308	0.263	0
2008	17	SMGR	10.53	1	8	5	0	5	18	3	13	7	0.229	0.238	0.149	0.143	0
2008	18	SMAR	10.06	2	8	5	0	4	12	3	11	5	0.523	0.104	0.134	0.085	0

2008	19	TIRA	8.52	1	8	1	0	3	5	3	11	5	0.650	0.058	0.369	0.217	0
2008	20	TRST	8.75	0	3	5	0	3	6	3	12	2	0.056	0.027	0.147	0.127	1
2008	21	UNTR	10.43	3	8	4	1	2	12	1	13	7	0.510	0.116	0.230	0.159	1
2009	22	AKRA	9.95	1	3	9	0	3	10	3	13	5	0.632	0.045	0.117	0.233	1
2009	23	ARNA	8.82	3	2	4	1	3	10	3	12	3	0.577	0.078	0.046	0.196	1
2009	24	ASGR	9.61	3	3	4	1	3	5	2	12	0	0.751	0.074	0.128	0.241	1
2009	25	AUTO	10.35	3	4	5	1	1	15	2	13	7	0.272	0.165	0.111	0.161	1
2009	26	CTBN	9.00	1	4	8	1	4	5	2	12	15	0.456	0.071	0.181	0.188	1
2009	27	DYNA	9.43	1	4	4	1	4	4	3	12	5	0.562	0.051	0.120	0.191	1
2009	28	FASW	9.42	1	3	4	1	3	12	3	13	1	0.568	0.075	0.105	0.129	1
2009	29	SMCB	9.71	1	4	4	1	3	9	3	13	3	0.544	0.123	0.053	0.091	1
2009	30	INTP	9.87	3	4	3	1	3	9	3	13	9	0.194	0.207	0.096	0.103	1
2009	31	KBLM	7.82	0	4	6	1	3	4	3	12	1	0.369	0.048	0.138	0.160	0
2009	32	KLBF	10.41	1	8	5	1	2	10	1	13	2	0.261	0.143	0.241	0.203	1
2009	33	KAEP	9.62	3	5	11	0	3	9	1	12	2	0.363	0.040	0.280	0.200	0
2009	34	MERK	10.12	1	2	15	1	2	7	1	12	1	0.184	0.338	0.184	0.409	1
2009	35	MTDL	9.11	3	3	4	1	3	2	4	12	0	0.617	0.095	0.150	0.346	1
2009	36	MDRN	9.44	2	3	4	1	3	4	1	12	4	0.574	0.016	0.219	0.207	1
2009	37	SMSM	9.01	3	3	8	1	3	4	2	12	1	0.422	0.141	0.271	0.296	0
2009	38	SMGR	10.19	2	2	0	0	0	12	0	13	7	0.555	0.701	0.297	0.303	1
2009	39	SMAR	9.63	2	2	5	2	3	10	3	13	16	0.515	0.073	0.210	0.110	0
2009	40	TIRA	9.24	1	4	3	0	3	6	3	11	5	0.589	0.011	0.325	0.267	0
2009	41	TRST	8.96	0	3	2	1	3	6	3	12	2	0.404	0.075	0.128	0.128	1
2009	42	UNTR	10.45	3	8	4	1	2	9	1	13	5	0.428	0.156	0.163	0.186	0
2010	43	AKRA	10.31	1	7	8	1	3	8	3	13	15	0.627	0.041	0.186	0.220	1

2010	44	ARNA	8.83	2	3	4	1	3	10	3	12	3	0.525	0.091	0.043	0.225	1
2010	45	ASGR	10.03	3	3	5	1	3	8	1	12	0	0.401	0.065	0.157	0.332	0
2010	46	AUTO	10.15	3	2	5	1	3	10	0	13	17	0.265	0.204	0.127	0.152	0
2010	47	CTBN	9.17	1	7	6	1	3	4	2	12	15	0.587	0.067	0.323	0.183	1
2010	48	DYNA	9.61	1	3	4	2	3	4	2	12	4	0.624	0.052	0.103	0.183	1
2010	49	FASW	9.38	1	3	4	1	3	13	3	13	12	0.597	0.063	0.112	0.118	1
2010	50	SMCB	9.12	3	8	4	0	3	5	2	13	3	0.346	0.079	0.048	0.062	1
2010	51	INTP	9.85	3	7	2	1	3	4	2	13	10	0.146	0.210	0.085	0.091	1
2010	52	KBLM	8.47	0	4	6	1	3	4	3	12	10	0.436	0.097	0.088	0.266	0
2010	53	KLBF	9.96	1	2	4	1	3	6	1	13	22	0.179	0.183	0.221	0.194	1
2010	54	KAEF	9.60	3	5	4	1	4	7	2	12	3	0.328	0.084	0.233	0.222	0
2010	55	MERK	10.26	3	2	0	1	2	7	2	12	1	0.165	0.273	0.288	0.206	1
2010	56	MTDL	9.22	1	3	4	1	3	4	3	12	0	0.618	0.032	0.229	0.350	1
2010	57	MDRN	9.58	1	3	4	1	3	6	3	12	4	0.536	0.053	0.151	0.247	1
2010	58	SMSM	8.95	1	3	4	1	3	4	2	12	1	0.467	0.141	0.288	0.294	0
2010	59	SMGR	10.28	3	6	0	0	0	0	0	11	7	0.220	0.233	0.104	0.113	1
2010	60	SMAR	10.50	3	8	5	1	3	12	2	11	6	0.521	0.101	0.217	0.152	0
2010	61	TIRA	8.32	0	4	12	0	3	12	4	13	5	0.560	0.018	0.305	0.241	0
2010	62	TRST	9.02	1	3	2	1	3	0	3	12	2	0.390	0.067	0.130	0.175	1
2010	63	UNTR	10.70	3	8	4	2	1	12	1	11	5	0.456	0.130	0.233	0.180	1
<b>Maksimal</b>			10.70	3.0	9.0	15.0	2.0	5.0	18.0	4.0	13.0	22.0	0.8	0.7	0.4	0.4	1.0
<b>Minimal</b>			7.82	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0
<b>Rata-rata</b>			9.52	1.8	4.4	4.9	0.8	2.9	7.3	2.2	12.3	5.5	0.5	0.1	0.2	0.2	0.7
<b>Simpangan baku</b>			0.62	1.1	2.1	2.7	0.5	0.9	3.8	1.0	0.7	5.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5

### LAMPIRAN 3

### OUTPUT PENGOLAHAN DATA

### DESKRIPTIF DATA

	N		Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
	Valid	Missing				
BOARDIND	63	0	1.7778	1.08426	.00	3.00
BOARDSIZE	63	0	4.4286	2.13809	2.00	9.00
BOARDMEET	63	0	4.8730	2.72676	.00	15.00
ACIND	63	0	.8413	.48214	.00	2.00
ACSIZE	63	0	2.9206	.86699	.00	5.00
ACMEET	63	0	7.3016	3.79148	.00	18.00
ACEXPERTISE	63	0	2.2222	1.00714	.00	4.00
ASSET	63	0	12.2698	.65270	11.00	13.00
SUB	63	0	5.5238	5.34867	.00	22.00
LEV	63	0	.4530	.17019	.06	.76
ROA	63	0	.1082	.10469	.01	.70
INV	63	0	.1755	.08622	.00	.37
REC	63	0	.1979	.07623	.06	.41
KAP	63	0	.6825	.46923	.00	1.00
FEE	63	0	7.6568E9	9.79099E9	6.60E7	4.47E10
LNFEED	63	0	9.5159	.62841	7.80	10.70

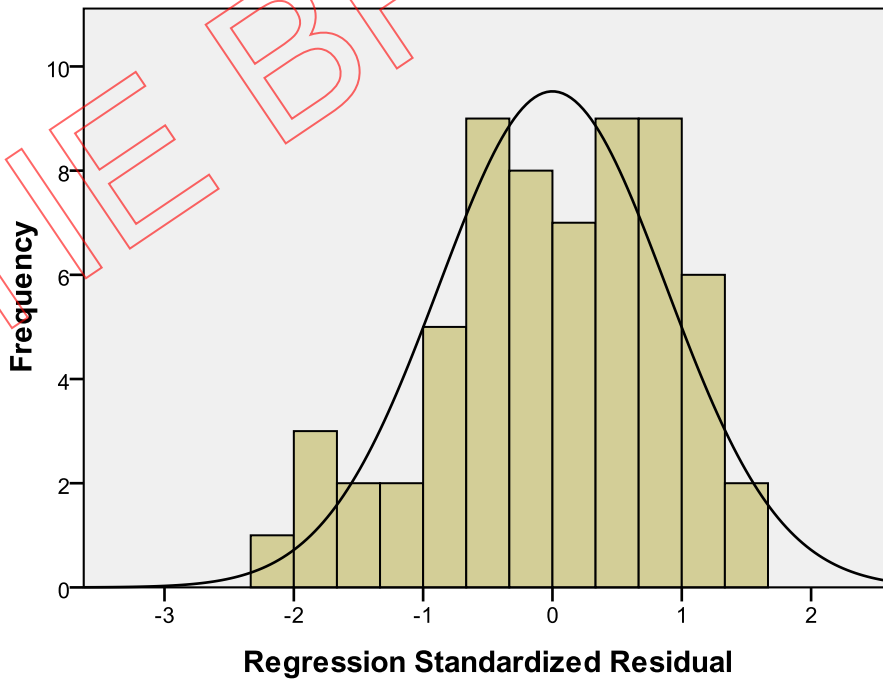
### UJI NORMALITAS DATA

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.39362890
Most Extreme Differences	Absolute	.093
	Positive	.042
	Negative	-.093
Kolmogorov-Smirnov Z		.734
Asymp. Sig. (2-tailed)		.653
a. Test distribution is Normal.		

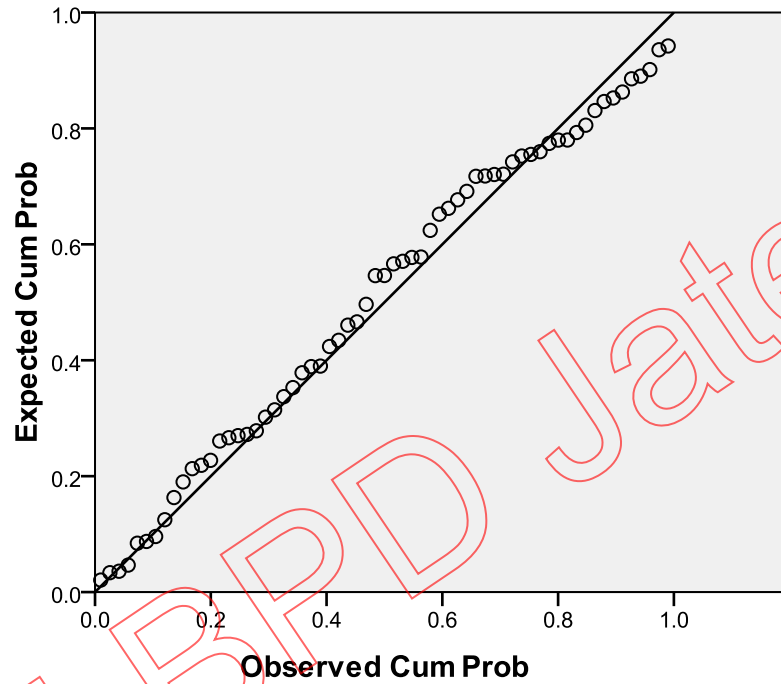
**Histogram**

**Dependent Variable: LNFE**



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: LNFEED**



**UJI ASUMSI KLASIK**

**UJI AUTOKORELASI**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.780 <sup>a</sup>	.608	.493	.44737	2.344

a. Predictors: (Constant), KAP, REC, ACEXPERTISE, ACIND, BOARDMEET, ASSET, BOARDIND, BOARDSIZE, LEV, SUB, ACMEET, INV, ACSIZE, ROA

b. Dependent Variable: LNFEED

## UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients<sup>a</sup>

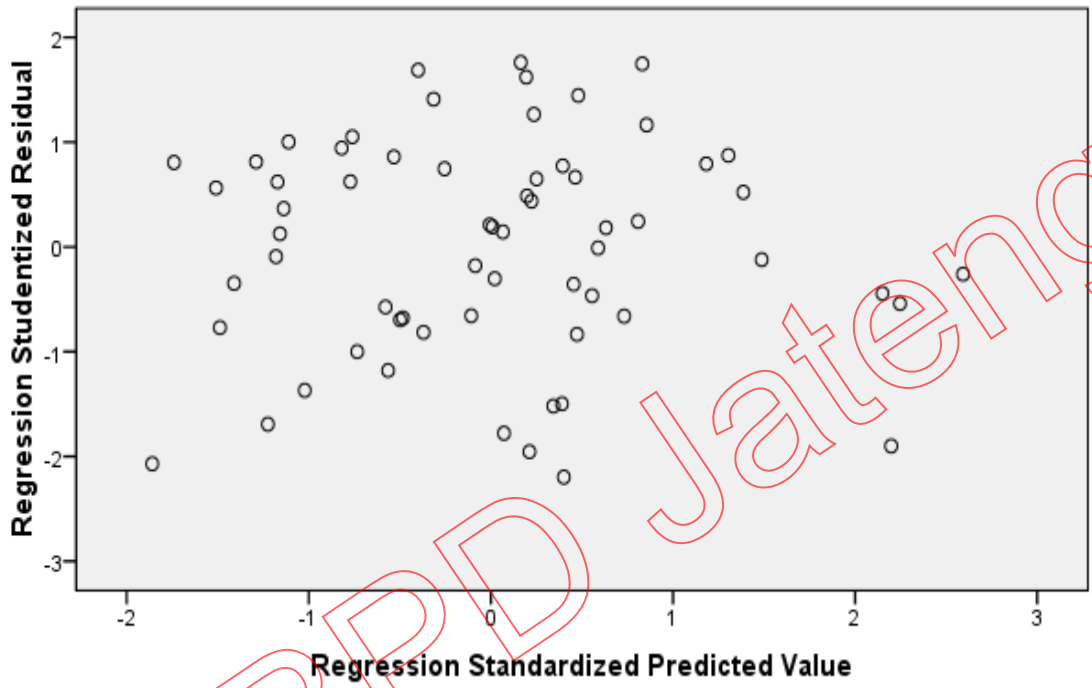
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.888	1.370		6.489	.000		
	BOARDIND	.159	.062	.274	2.576	.013	.724	1.381
	BOARDSIZE	.052	.031	.176	1.661	.103	.728	1.374
	BOARDMEET	-.007	.027	-.031	-.268	.790	.606	1.651
	ACIND	.094	.133	.072	.707	.483	.783	1.277
	ACSIZE	-.073	.090	-.101	-.812	.421	.529	1.891
	ACMEET	.076	.020	.459	3.839	.000	.572	1.749
	ACEXPERTISE	-.181	.077	-.291	-2.360	.022	.538	1.858
	ASSET	-.010	.110	-.010	-.088	.930	.624	1.603
	SUB	.014	.013	.119	1.044	.302	.625	1.599
	LEV	-.028	.439	-.008	-.064	.949	.578	1.730
	ROA	.263	.892	.044	.295	.769	.370	2.700
	INV	-.225	.839	-.031	-.268	.790	.616	1.622
	REC	.313	1.192	.038	.263	.794	.391	2.557
	KAP	.202	.150	.151	1.341	.186	.648	1.543

a. Dependent Variable: LNFEET

## UJI HETEROKEDASITAS

### Scatterplot

Dependent Variable: LNFEED



UJI GLEJSER



Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.621	.640		.970	.337
	BOARDIND	-.051	.029	-.259	-1.786	.080
	BOARDSIZE	.019	.015	.184	1.273	.209
	BOARDMEET	.005	.013	.065	.410	.683
	ACIND	-.070	.062	-.157	-1.126	.266
	ACSIZE	.011	.042	.044	.259	.797
	ACMEET	.010	.009	.168	1.029	.308
	ACEXPERTISE	.049	.036	.227	1.352	.183
	ASSET	-.048	.051	-.146	-.933	.356
	SUB	-.002	.006	-.055	-.350	.728
	LEV	.159	.205	.126	.775	.442
	ROA	.490	.417	.238	1.175	.246
	INV	-.532	.392	-.213	-1.357	.181
	REC	.365	.557	.129	.655	.515
	KAP	.056	.070	.121	.790	.433

a. Dependent Variable: Abs\_res

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.888	1.370		6.489	.000
	BOARDIND	.159	.062	.274	2.576	.013
	BOARDSIZE	.052	.031	.176	1.661	.103
	BOARDMEET	-.007	.027	-.031	-.268	.790
	ACIND	.094	.133	.072	.707	.483
	ACSIZE	-.073	.090	-.101	-.812	.421
	ACMEET	.076	.020	.459	3.839	.000
	ACEPERTISE	-.181	.077	-.291	-2.360	.022
	ASSET	-.010	.110	-.010	-.088	.930
	SUB	.014	.013	.119	1.044	.302
	LEV	-.028	.439	-.008	-.064	.949
	ROA	.263	.892	.044	.295	.769
	INV	-.225	.839	-.031	-.268	.790
	REC	.313	1.192	.038	.263	.794
	KAP	.202	.150	.151	1.341	.186

a. Dependent Variable: Ln\_LF

### UJI KOEFISIEN DETERMINASI (ADJUSTED R SQUARE)

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.780 <sup>a</sup>	.608	.493	.44737

a. Predictors: (Constant), KAP, REC, ACEXPERTISE, ACIND, BOARDMEET, ASSET, BOARDIND, BOARDSIZE, LEV, SUB, ACMEET, INV, ACSIZE, ROA

### UJI F

Dengan  $n = 63$   $k = 14$  diperoleh  $F_{table} = 1.8991972$

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.878	14	1.063	5.310	.000 <sup>a</sup>
	Residual	9.607	48	.200		
	Total	24.484	62			

a. Predictors: (Constant), KAP, REC, ACEXPERTISE, ACIND, BOARDMEET, ASSET, BOARDIND, BOARDSIZE, LEV, SUB, ACMEET, INV, ACSIZE, ROA

b. Dependent Variable: LNFEET

### UJI T

Dengan  $n = 63$   $k = 14$  diperoleh tabel = 2,011.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.888	1.370		6.489	.000
	BOARDIND	.159	.062	.274	2.576	.013
	BOARDSIZE	.052	.031	.176	1.661	.103
	BOARDMEET	-.007	.027	-.031	-.268	.790
	ACIND	.094	.133	.072	.707	.483
	ACSIZE	-.073	.090	-.101	-.812	.421
	ACMEET	.076	.020	.459	3.839	.000
	ACEPERTISE	-.181	.077	-.291	-2.360	.022
	ASSET	-.010	.110	-.010	-.088	.930
	SUB	.014	.013	.119	1.044	.302
	LEV	-.028	.439	-.008	-.064	.949
	ROA	.263	.892	.044	.295	.769
	INV	-.225	.839	-.031	-.268	.790
	REC	.313	1.192	.038	.263	.794
	KAP	.202	.150	.151	1.341	.186

a. Dependent Variable: Ln\_LF

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mutika Diansepti  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 14 September 1989  
Alamat : Jl. Bulusari no.27 RT.05 RW.02 Bulakamba Brebes  
Telpon : 085726883004  
E mail : [MutikaDiansepti@gmail.com](mailto:MutikaDiansepti@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan Formal :

<b>Pendidikan</b>	<b>Sekolah</b>	<b>Tahun</b>
SD	SD N Mangkang Kulon 1, Semarang	1996
	SD N 03 Bulakamba, Brebes	1996
SMP	SMP N 02 Brebes	2002
SMA	SMA N 1 Brebes	2005
Universitas	STIE Bank BPD Jateng, Semarang	2008

Semarang, 2012

Mutika Diansepti